



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT, maka penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis merupakan dokumen yang wajib disusun oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Serang sebagai bentuk komitmen pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera Berkeadilan dan Agamis"**. Dengan mewujudkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang sebagai institusi penanggulangan bencana yang tanggap dan berdaya terhadap bencana.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026, yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) selama 5 tahun. Di dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis ini merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Isue Strategis, Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, serta Indikator Kinerja yang disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung Visi Kabupaten dalam membangun Kabupaten Serang lima tahun ke depan.

Kami menyadari Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak. Oleh karena itu masukan dan saran untuk perbaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis ini akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang ini dapat berguna sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Serang.

Serang, November 2021

**KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN SERANG**



NANA SUKMANA KUSUMA, SE, MM
NIP. 196404241985031015

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Serang Tahun 2021	16
Tabel 2.2.	Komposisi pegawai BPBD Kabupaten Serang Tahun 2021	17
Tabel 2.3.	Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran Tahun 2012-2021	18-19
Tabel 2.4.	Daftar Lembaga Terkait/Mitra Kerja BPBD Kabupaten Serang	20-22
Tabel 2.5.	Jenis Pelayanan Dasar Dalam SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pada Sub Urusan Bencana Dan Sub Urusan Kebakaran Yang Dilaksanakan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang	23
Tabel 2.6.	Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian dan Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Dan Sub Urusan Kebakaran Yang Dilaksanakan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang	24
Tabel 2.7.	Target dan Realisasi Capaian Pelayanan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018-2020	27
Tabel 2.8.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017-2020	28
Tabel 2.9.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016-2020	31
Tabel 2.10.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016-2020	32-40
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026	42
Tabel 3.2.	Telaah Visi, Misi dan Program KDH/WKDH Sesuai Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang	48
Tabel 3.3.	Misi, Tujuan, Sasaran Dan Indikator Sasaran BPBD Provinsi Banten Tahun 2017-2022	52
Tabel 3.4.	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan BPBD Provinsi Banten Tahun 2017-2022	52
Tabel 3.5.	Identifikasi Isue Strategis Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Serang	65
Tabel 4.1.	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026	70

Tabel 4.2.	Program, Kegiatan, Dan Indikator Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026	71-82
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan	84
Tabel 6.1.	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan BPBD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026	86-91
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Program Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026	93

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii-iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan hukum	3
1.3. Maksud dan tujuan	5
1.4. Sistematika penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	42
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	42
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	46
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	49
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	53
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	64
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	67
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	67
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	83
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	85
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	92
BAB VIII PENUTUP	94
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 1 ayat 22).

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat

Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (RENJA) tahunan masing-masing Perangkat Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang melaksanakan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang dan Peraturan Bupati Serang Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 – 2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program dan kegiatan selama lima tahun.

Renstra meliputi program dan kegiatan internal maupun eksternal, yang merupakan program Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, program lintas Perangkat Daerah, dan program lintas wilayah. Renstra Perangkat Daerah menekankan tentang pentingnya setiap Perangkat Daerah memiliki tolok ukur kinerja kunci pelayanan Perangkat Daerah yang jelas berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dapat memberikan gambaran secara cepat kepada masyarakat tentang status kinerja pelayanan Perangkat Daerah; dan rencana pencapaian program Perangkat Daerah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan RPJMD, oleh karena itu maka kualitas penyusunan Renstra Perangkat Daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan

fungsi Perangkat Daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan Kepala Daerah selama masa kepemimpinannya.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 disusun dengan berlandaskan pada dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
20. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang tahun 2006-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang;
32. Peraturan Bupati Serang Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah :

1. Memenuhi ketentuan perundang-undangan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang berpedoman pada RPJMD;
2. Sebagai Dokumen Perencanaan Jangka Menengah lima tahun yang memuat isue strategis, tujuan dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif perkegiatan Bappeda Kabupaten Serang selama 5 (lima) tahun kedepan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dari dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam mengarahkan pelayanan yang diberikan Bappeda dalam proses pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
2. Sebagai petunjuk yang menjelaskan tentang apa yang hendak dicapai oleh Bappeda dalam 5 (lima tahun) mendatang; bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.
3. Sebagai acuan serta mempermudah pengendalian kegiatan dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Bappeda selama lima tahun dengan membandingkan antara input, output, proses dan hasil (*outcome*) yang dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 111, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat : Latar belakang, Landasan hukum, Maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat : Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah dan kinerja pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat : Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Isue Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat : Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang sinergi dengan tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rancangan Akhir RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat : Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, dan pendanaan indikatif yang sinergi dengan tujuan dan sasaran yang dirumuskan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Memuat : Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, dan pendanaan indikatif yang sinergi dengan tujuan dan sasaran yang dirumuskan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat : Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 5 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka dipandang perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang yang baru mulai berdiri pada Bulan Januari Tahun 2012.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab kepada Bupati Serang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang mempunyai tugas membantu Bupati Serang dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, sehingga keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai arti yang penting bagi masyarakat khususnya dalam penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang berklasifikasi tipe A, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang dan Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2016, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dengan sub urusan di bidang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang memiliki **tugas pokok** yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang mempunyai **fungsi** :

1. Perencanaan program kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan kedaruratan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta pemadam kebakaran;
2. Pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan kedaruratan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta pemadam kebakaran;
3. Pelaksanaan administrasi dan teknis operasional pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan kedaruratan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta pemadam kebakaran; dan
4. Pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan kedaruratan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta pemadam kebakaran.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang sesuai ketentuan Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan ;
- b. Kepala Pelaksana Badan;
- c. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
- d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengurangan Resiko Bencana;
 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- e. Bidang Penanganan Darurat (Kedaruratan), terdiri dari :
 1. Sub Bidang Tanggap Darurat;
 2. Sub Bidang Logistik dan Sarana dan Prasarana;
 3. Sub Bidang Perbaikan dan Bantuan Darurat .
- f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Penilaian Kerusakan;
 2. Sub Bidang Penanganan Pengungsi;
 3. Sub Bidang Pemulihan dan Peningkatan Fisik, Sosial dan Ekonomi.
- g. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran;
 2. Sub Bidang pencegahan dan Proteksi Kebakaran;
 3. Sub Bidang Penyelamatan Kebakaran.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang dan Lampiran Peraturan Bupati Serang Nomor 111 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, maka masing-masing jabatan struktural di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang memiliki tugas pokok sebagai berikut :

I. KEPALA BADAN

Kepala Badan berkedudukan langsung di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi seluruh kegiatan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah.

II. KEPALA PELAKSANA BADAN

Kepala Pelaksana Badan berkedudukan langsung di bawah Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang sekaligus merupakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi seluruh kegiatan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah.

III. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Kesekretariatan badan.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian, masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Tiga Kepala Sub Bagian tersebut adalah:

1. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi

Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Program dan Evaluasi.

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas keumuman dan kepegawaian.

3. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas keuangan.

IV. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Laboratorium dalam melaksanakan tugasnya membawahi 2 (dua) Sub Bidang, masing masing sub bidang dipimpin Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Dua Kepala Sub Bidang tersebut adalah:

1. Kepala Sub Bidang Pengurangan Resiko Bencana.

Kepala Sub Bidang Pengurangan Resiko Bencana mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas pengurangan resiko bencana.

2. Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan.

Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas kesiapsiagaan bencana.

V. BIDANG PENANGANAN DARURAT (KEDARURATAN)

Bidang Penanganan Darurat (Kedaruratan) dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas penanganan kedaruratan bencana.

Bidang Penanganan Darurat (Kedaruratan) membawahi 3 (tiga) sub bidang, masing-masing sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Darurat (Kedaruratan). Tiga Kepala Sub Bidang tersebut adalah :

1. Kepala Sub Bidang Tanggap Darurat.

Kepala Sub Bidang Tanggap Darurat mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas tanggap darurat kebencanaan.

2. Kepala Sub Bidang Logistik dan Sarana Prasarana.

Kepala Sub Bidang Logistik dan Sarana Prasarana mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas logistik dan sarana prasarana kebencanaan.

3. Kepala Sub Bidang Perbaikan dan Bantuan Darurat.

Kepala Sub Bidang Perbaikan dan Bantuan Darurat mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas perbaikan dan bantuan darurat.

VI. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi dampak kebencanaan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi 3 (tiga) sub bidang, masing-masing sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Tiga Kepala Sub Bidang tersebut adalah :

1. Kepala Sub Bidang Penilaian Kerusakan.

Kepala Sub Bidang Penilaian Kerusakan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas penilaian kerusakan kebencanaan.

2. Kepala Sub Bidang Penanganan Pengungsi.

Kepala Sub Bidang Penanganan Pengungsi mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Penanganan Pengungsi.

3. Kepala Sub Bidang Pemulihan dan Peningkatan Fisik, Sosial dan Ekonomi.

Kepala Sub Bidang Pemulihan dan Peningkatan Fisik, Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas pemulihan dan peningkatan fisik, sosial dan ekonomi bagi korban kebencanaan.

VII. BIDANG PEMADAM KEBAKARAN.

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas pemadam kebakaran.

Bidang Pemadam Kebakaran membawahi 3 (tiga) sub bidang, masing-masing sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran. Tiga Kepala Sub Bidang tersebut adalah :

1. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran.

Kepala Sub Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas penanggulangan bencana kebakaran.

2. Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Proteksi Kebakaran.

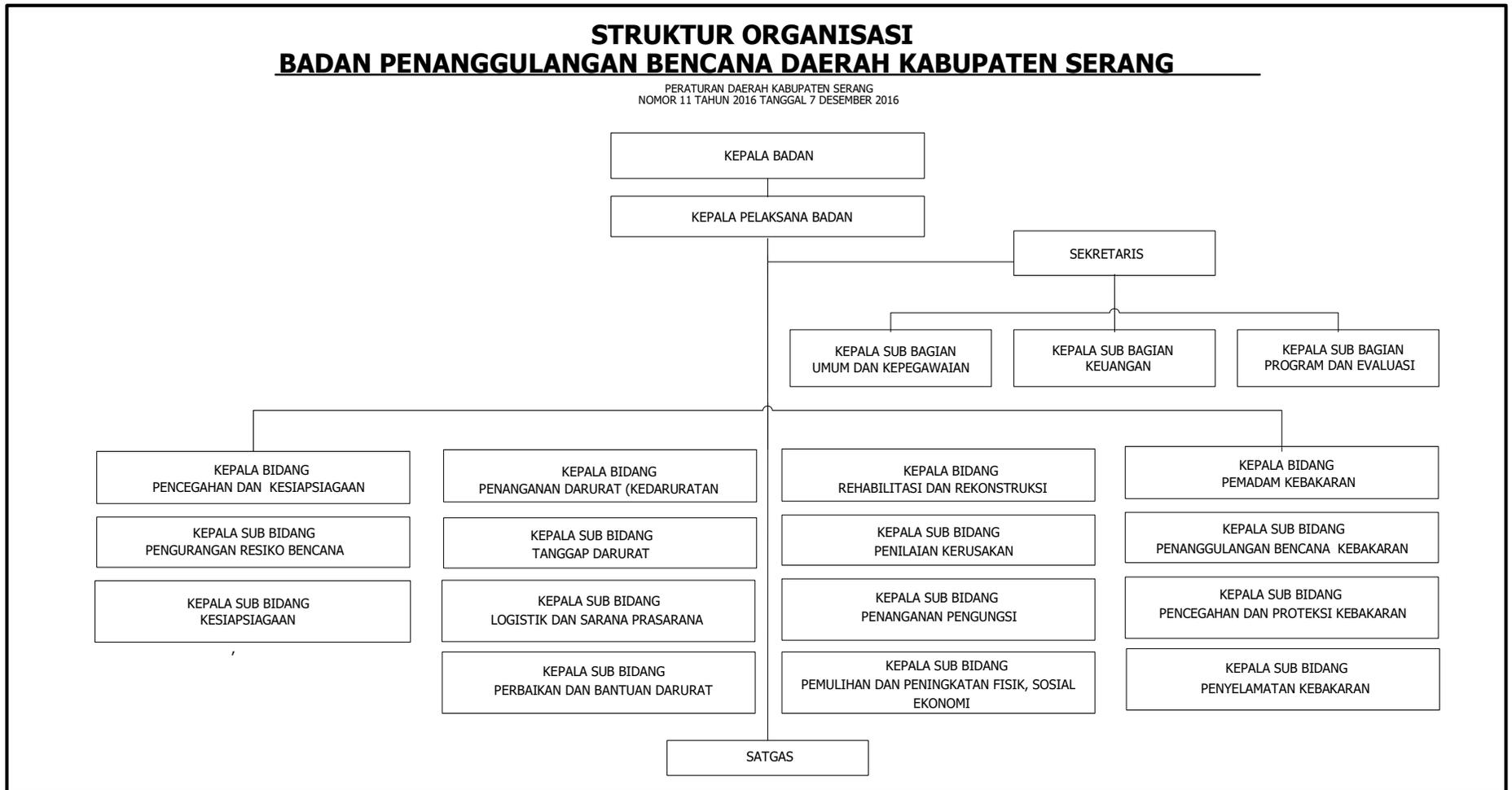
Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Proteksi Kebakaran mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas pencegahan dan proteksi kebakaran.

3. Kepala Sub Bidang Penyelamatan Kebakaran.

Kepala Sub Bidang Penyelamatan Kebakaran mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang sesuai Peraturan Bupati Serang Nomor 74 tahun 2016 dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang pada saat dokumen Rencana Strategis ini disusun berjumlah 303 orang, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 56 orang dan Non PNS sebanyak 247 orang. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 56 orang, yaitu 18 orang pejabat struktural dan 38 orang staf. Jumlah pejabat struktural di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang seharusnya berjumlah 20 orang, akan tetapi karena ada posisi 1 pejabat Kepala Bidang dan 1 pejabat Kepala Sub Bidang yang pensiun dan belum terisi dengan pejabat baru sehingga jumlah pejabat struktural hanya ada 18 orang. Jumlah pegawai Non PNS sebanyak 247 orang terdiri dari Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 3 orang, pramubakti sebanyak 6 orang, petugas kebersihan sebanyak 3 orang, anggota damkar sebanyak 115 orang, dan 121 anggota TRC/operator Pusdalops/Rescue.

Data jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1.

Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021

NO.	INDIKATOR	JUMLAH
1.	Eselon II	1 orang
2.	Eselon III	4 orang
3.	Eselon IV	13 orang
4.	Fungsional	-
5.	Staff/pelaksana	285 orang
	Jumlah total pegawai	303 orang

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang didukung oleh berbagai sumber daya yang dimiliki, antara lain menyangkut sumber daya manusia serta sarana dan prasarana evakuasi bencana dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Dari sisi **sumber daya manusia**, aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang terdiri dari para pegawai yang diurai menurut status

kepegawaian, kepangkatan, tingkat pendidikan formal/fungsional/struktural, dan jenis kelamin, sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021

a.	Berdasarkan Status Kepegawaian		
	– Pegawai Negeri Sipil	:	56 Orang
	– Tenaga Kerja Kontrak/TKK	:	3 Orang
	– Pramubakti	:	6 Orang
	– Tenaga petugas kebersihan	:	3 Orang
	– Staf administrasi, anggota Damkar, TRC, Rescuer (SAR) dan operator PUSDALOPS-PB	:	235 Orang
b.	Berdasarkan kepangkatan		
	– Gol.IV	:	7 Orang
	– Gol. III	:	29 Orang
	– Gol. II	:	17 Orang
	– Gol. I	:	3 Orang
c.	Berdasarkan Tingkat Pendidikan :		
	1. Pendidikan Formal		
	– S 2	:	12 Orang
	– S 1	:	21 Orang
	– D3	:	1 Orang
	– SLTA	:	17 Orang
	– SLTP	:	5 Orang
	– SD	:	-
	2. Pendidikan Struktural		
	ADUM / ADUMLA / DIKLATPIM IV		11 orang
	SPAMA / DKILATPIM III		2 orang
	DIKLAT PIM II		1 orang
	3. Pendidikan Fungsional		
		:	-
d.	Berdasarkan Jenis Kelamin		
	– Laki-laki	:	247 Orang
	– Perempuan	:	56 Orang

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang sebagian berasal dari pengadaan sarana dan prasarana yang dananya bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Serang dan sebagian lagi berasal dari hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Untuk itu diperlukan biaya pemeliharaan yang cukup besar dari post anggaran APBD Kabupaten Serang untuk perawatan sarana dan prasarana tersebut setiap tahunnya.

Data sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran
Tahun 2012-2021

NO	NAMA BARANG	JML YANG DIMILIKI		KEADAAN	KETERANGAN
		Volume	Satuan		
1	Perahu Karet Landing Cup Rubber (LCR)	4	Unit	Baik	
2	Perahu Karet / River Boat (arung jeram)	7	Unit	Baik	
3	Mesin Perahu Karet Kapasitas 15 PK	6	Unit	Baik	
4	Mesin Perahu Karet Kapasitas 18 PK	3	Unit	Baik	
5	Mesin Perahu Karet Kapasitas 25 PK	2	Unit	Baik	
6	Mesin Perahu Karet Kapasitas 40 PK	2	Unit	Baik	
7	Pelampung (Life Jacket)	35	Buah	Baik	
8	Velbed / Tandu	65	Unit	Baik	
9	Handy Talk (HT)	3	Unit	Baik	
10	Lampu Senter Hid Search Light	2	Unit	Baik	1 Unit Rusak
11	Lampu Penerang (Solar Cell)	5	Unit	Baik	
12	Solar Handle Lamp	12	Unit	Baik	
13	Genset 5 KVA	1	Unit	Baik	
14	Genset 10 KVA	1	Unit	Baik	
15	Tenda Pengungsi	4	Unit	Baik	
16	Tenda Keluarga/ Family (Ukuran 4 m x 4 m)	20	Unit	Baik	
17	Tenda Regu (Ukuran 4 m x 6 m)	8	Unit	Baik	
18	Tenda Pleton (Ukuran 5 m x 14 m)	1	Unit	Baik	
19	Tenda Posko (Ukuran 6 m x 15 m)	5	Unit	Baik	
20	Tenda Pengungsi	3	Unit	Baik	

NO	NAMA BARANG	JML YANG DIMILIKI		KEADAAN	KETERANGAN
		Volume	Satuan		
21	RIG			Baik	
	- VHF transceiver 1 com Ic-V220H	2	Unit	Baik	
	- Antena Hygain V2R USA	2	Unit	Baik	
	- Dc Power Supply 30 Amp	2	Unit	Baik	
	- (40 m) Coaxial Cable R68 + Connector	2	Rol	Baik	
22	SSB			Baik	
	- Hf/Ssb Icom Lc-m 700 Pro	2	Unit	Baik	
	- Wipe Antena Shakerpare 383 + Manting	2	Unit	Baik	
	- Automatic Antena Tuner at 130	2	Unit	Baik	
	- Dc Power Supply 30 Amp	2	Unit	Baik	
	- (40 m) Coaxial Cable R68 + Connector	2	Rol	Baik	
23	Tambang Dadu (Webbing) Ø 12 mm	1,515	Kg	Baik	
24	Water Treatment Portable	1	Set	Baik	
25	Mesin Alcone	10	Buah	Baik	
26	Alat Selam (Baju + Tabung)	3	Paket	Baik	
27	SCBA	1	Unit	Baik	
28	Chain Saw Besi	1	Unit	Baik	
29	Chain Saw Kayu	3	Unit	Baik	
30	Mata Gergaji Chain Saw	1	Unit	Baik	
31	Mobil Rescue	1	Unit	Baik	
32	Motor Trail Rescue	4	Unit	Baik	
33	Motor ATV (All Terrain Vehicle)	2	Unit	Baik	
34	Modular Office	1	Unit	Baik	
35	Mobil Pick Up Toyota Hilux	1	Unit	Baik	
36	Mobil Pick Up Isuzu Panther	2	Unit	Baik	
37	Mobil Kijang Panther	1	Unit	Baik	
38	Mobil Ambulance	2	Unit	Baik	
39	Mobil Pemadam Kebakaran Kap. 5000 liter	3	Unit	Baik	
40	Mobil Pemadam Kebakaran Kap. 3000 liter	2	Unit	Baik	1 Unit Rusak
41	Mobil Water Supply	2	Unit	Baik	1 alih fungsi dari mbl pemadam kebakaran
42	Pompa Air Isap (Water Pump) Merek Honda	2	Buah	Baik	
43	Ring Boy Kapsul	20	Buah	Baik	
44	Kantong Mayat	140	Buah	Baik	
45	Tandu Lipat	13	Buah	Baik	
46	Lampu Surya/Multi-Purpose Rechargeable Lamp	5	Buah	Baik	
47	Vallet	1	Buah	Baik	
48	Tandu basket,spinal dan tandu sekop	1	Set	Baik	
49	Head Lamp	2	Buah	Baik	
50	Masker Fullface	2	Buah	Baik	
51	Tongkat Lalulintas	2	Buah	Baik	
52	Tas First Aid	2	Buah	Baik	
53	Alcon Penghisap Lumpur + Selang	2	Set	Baik	

Selain sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran, diperlukan juga adanya barang bantuan/logistik untuk keperluan korban bencana alam pada saat situasi tanggap darurat. Untuk memenuhi kebutuhan barang bantuan/logistik tersebut perlu dilakukan pengadaan logistik bencana atau barang bantuan bencana yang akan diserahkan kepada masyarakat. Dananya bersumber dari APBD Kabupaten Serang, berupa pembelian sembako, makanan siap saji dan juga material bahan bangunan untuk memperbaiki rumah warga yang rusak akibat bencana. Selain dari APBD Kabupaten Serang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang juga mendapatkan bantuan logistik bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten dan BNPB untuk korban bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang bekerja sama dengan beberapa kelembagaan terkait. Baik itu kelembagaan pemerintah daerah, kelembagaan vertikal pemerintah, dan kelembagaan non-pemerintah. Kelembagaan tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Daftar Lembaga Terkait/Mitra Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang

No.	Nama Instansi/Lembaga	Alamat Instansi/Lembaga
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Serang	Jl. Veteran No.1 Kota Serang, Telp : (0254) 200252, Fax : (0254) 201952
2	Sekretariat Dewan Kabupaten Serang	Jl. Veteran No.1 Kota Serang, Telp : (0254) 200020, Fax : (0254) 223966
3	Inspektorat Kabupaten Serang	Jl. Diponegoro No.1 Kota Serang, Telp/Fax : 200816
4	BAPPEDA Kabupaten Serang	Jl. Veteran No. 1 Serang, Telp : (0254) 203135
5	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang	Jl. Syam'un Bakri No.1 Kota Serang, Telp : (0254) 200363
6	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang	Lantai 2, Jl. KH. Brigjen Syam'un No.7 Kota Baru, Kota Serang, No. Telp : (0254) 200177
7	Dinas Sosial Kabupaten Serang	Jl. Raya Serang-Petir No.1 Ds. Cilaku Kec. Curug-Kota Serang, Telp : (0254) 200304, Fax : 216978
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Serang	Jl. Ki Mas Jong No.11 Kota Serang, Telp : (0254) 200526, Fax. : (0254) 203812

No.	Nama Instansi/Lembaga	Alamat Instansi/Lembaga
9	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang	Jl. Syam'un Bakri No.1 Kota Serang
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang	Jl. Raya Penancangan No.35 Kota Serang, Telp/Fax. : (0254) 268025
11	Dinas Perhubungan Kabupaten Serang	Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan-Kota Serang, Telp : 280529-284928, Fax : (0254) 280530-285930
12	Dinas Pertanian Kabupaten Serang	Jl. Kolonel Yusuf Martadilaga No.54 Kota Serang, Telp/Fax. : (0254) 200125
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang	Lantai 3, Jl. KH. Brigjen Syam'un No.7 Kota Baru, Kota Serang
14	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serang	Jl. Ki Tapa No.1 Kota Serang, Telp/Fax. : (0254) 207707
15	RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang	Jl. Rumah Sakit No. 1, Telp : (0254) 200528, Fax : (0254) 200787
16	BPBD Provinsi Banten	Jl. Syekh Nawawi Al Bantani No.7 Kel. Banjar Agung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Telp/Fax. : (0254) 7822841 - 7921283, Telp. Posko : 087772542700. Web : bpbdbantenprov.go.id , Email : bpbdbanten2014@gmail.com ; pusdalopsb.banten@gmail.com ; pusdatin-bpbdbanten@gmail.com
17	BPBD Kota Serang	Jl. Jend. Sudirman Ruko Blok E.1 No.3, Perum KSB, Kota Serang, Telp : (0254) 223863
18	BPBD Kota Tangerang Selatan	
19	BPBD Kabupaten Pandeglang	
20	BPBD Kabupaten Lebak	
21	Basarnas	Jl. Raya Serang Cilegon, KM. 70, Desa Wanayasa, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang - Provinsi Banten (Depan Taman Wisata Wulandira)
22	Group I Kopassus	Jl. Raya Serang-Cilegon KM.5 Kota Serang
23	KODIM Serang	Jl. Raya Pandeglang Km.5 Kota Serang, Telp : (0254) 251325
24	POLRES Serang Kota	Jl. Jendral Ahmad Yani No.68 Kota Serang, Telp : (0254) 200210 - 200771
25	KODIM Cilegon	Jl. Jend. Sudirman Kota Cilegon
26	POLRES Cilegon	Jl. Jend. Sudirman Kota Cilegon, Telp : 386803

No.	Nama Instansi/Lembaga	Alamat Instansi/Lembaga
27	POLRES Kabupaten Serang	Jl. Bhayangkara No.01 Kragilan, Kabupaten Serang
28	BMKG – Serang (Stasiun Meteorologi Serang)	Jl. Raya Taktakan-Kota Serang, Telp : 087883690007 / (0254) 200185
29	BULOG Kabupaten Serang	Jl. Raya Serang- Cilegon KM.3 Kota Serang, Telp : (0254) 213217
30	Badan Pusat Statistik	Jl. Letnan Jidun - Kota Serang, Telp : (0254) 200705
31	PDAM Tirta Al-Bantani	Jl. KH. A. Khotib Kota Serang, Telp : (0254) 201443, Fax. : (0254) 203336
32	PT. Jasa Marga	Jl. Lingk. Bangdes Km.4 Kota Serang, Telp : (0254) 280472
33	PT. Marga Mandala Sakti	Jl. Kp. Kemang Penancangan, Telp : (0254) 207878
34	PMI Cabang Serang	Jl. Jend. Sudirman No.27 Kota Serang, Telp : (0254) 201657
35	TAGANA KABUPATEN SERANG	Jl. Raya Serang-Petir No.1 Ds. Cilaku Kec. Curug-Kota Serang, Telp : (0254)200304, Fax : 216978
36	FKPPI KABUPATEN SERANG	Taman Graha Asri Blok G3 No.19 Saya Bulu Serang
37	ORARI / RAPI KABUPATEN SERANG	Jl. Letnan Jidun Kota Serang, Telp : 0818129679
38	PRAMUKA KABUPATEN SERANG	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/ kota, meliputi :

1. SPM Pendidikan
2. SPM Kesehatan
3. SPM Pekerjaan Umum

4. SPM Perumahan Rakyat
5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
6. SPM Sosial

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang melaksanakan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat bersama dengan Dinas Satuan Polisi Pramong Praja (Dinas Satpol PP) Kabupaten Serang, akan tetapi SPM yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang adalah pada Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran. Adapun jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Jenis Pelayanan Dasar Dalam SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pada Sub Urusan Bencana Dan Sub Urusan Kebakaran Yang Dilaksanakan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA JENIS PELAYANAN DASAR
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran

Penerapan pelaksanaan SPM yang harus dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian dan Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Dan Sub Urusan Kebakaran Yang Dilaksanakan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun

Untuk teknis pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana berdasarkan pada Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Uraian Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-Urusan bencana daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain sebagai berikut : Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut

Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya : rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung). Dasar pemikirannya adalah Informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain : Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya : rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung). Dasar pemikirannya adalah pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana antara lain : Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas. Khusus untuk penanganan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya : rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung). Dasar pemikirannya adalah keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin.

Berikut ini adalah tabel target dan capaian realisasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang serta target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang sesuai Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017-2020.

Tabel 2.7.
Target dan Realisasi Capaian Pelayanan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018-2020

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra			Realisasi Capaian			Rasio Capaian		
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.8.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017-2020

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2017		2018		2019		2020		Ket
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa	10	8	20	20	30	56	40	80	32 Destana dan 48 KMSB
2.	Response Time tanggap darurat bencana	Menit	30	30	30	30	15	8,9	15	7,4	
3.	Persentase unit bangunan yang terpulihkan pasca bencana (jalan, jembatan, rumah warga/pemukiman)	%	10	100	26	100	100	100	75	96,12	
4.	Rasio jumlah kejadian kebakaran/jumlah daerah rawan kebakaran berdasarkan pemetaan	Kecamatan	5	5	5	5	5	10	5	4,2	
5.	Response Time tanggap darurat kebakaran	Menit	30	30	30	30	25	19,58	20	13,99	

Dari tabel 2.7 dan dapat dilihat bahwa indikator kinerja SPM Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang dapat dilaksanakan dengan baik dengan realisasi capaian mencapai 100% di setiap tahunnya.

Dari tabel 2.8 diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya melebihi target dan tidak mencapai target. Ada 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggunakan pola penghitungan menurun, yaitu Response Time tanggap darurat bencana, Response Time tanggap darurat kebakaran dan Rasio jumlah kejadian kebakaran dibagi jumlah daerah rawan kebakaran berdasarkan pemetaan. Artinya apabila angka yang diperoleh nominalnya lebih kecil daripada target yang telah ditetapkan maka capaian realisasinya lebih baik. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut didukung oleh anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Serang dan Bank Dunia (*World Bank*) dalam dukungan pelaksanaan kegiatan Flood Management On Selected River Basin (FMSRB).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya terhadap peran dan fungsi yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran satuan kerja lain yang telah ada terlebih dahulu. Untuk kedepan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja sehingga terwujud upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat” bencana saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), pada saat bencana (tanggap darurat bencana) dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana) itu sendiri. Apabila diterapkan ke dalam daur program kerja, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus sistemik kegiatan kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi yang berkesinambungan melibatkan berbagai pihak (stakeholders) terkait, sesuai dengan

ketentuan umum tahapan penanggulangan bencana yang telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Berdasarkan capaian indikator kinerja yang telah dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang pada Rencana Strategis tahun 2017-2020, beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Serang adalah :

1. Meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur dalam penanggulan bencana dan kebakaran didalam daerah, antara lain : unsur SKPD terkait, unsur Kodim dan Koramil, unsur Polres dan Polsek, unsur masyarakat di desa dan kecamatan, serta LSM;
2. Meningkatkan kesiapsiagaan aparatur dalam pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian bantuan untuk wilayah di Kabupaten Serang yang tertimpa bencana;
4. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang untuk membantu evakuasi korban bencana serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
5. Meningkatkan keahlian dan keterampilan SDM aparatur dan masyarakat dalam melaksanakan penanggulangan bencana dan kebakaran;
6. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan kalangan industri tentang penanggulangan bencana dan kebakaran.

Berikut ini adalah tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang selama periode Rencana Strategis sebelumnya.

Tabel 2.9.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016-2020

Program	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelayanan administrasi perkantoran	1.593.840.000	2.953.174.000	2.991.115.467	2.233.245.000	1.907.866.250	1.394.654.939	2.439.399.797	2.706.522.520	2.191.549.930	1.806.001.318	87,50	82,60	90,49	98,13	94,66	62.805.250	82269275,8
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.597.216.000	1.374.652.000	130.791.000	1.584.156.000	1.288.251.000	1.140.065.257	1.335.878.000	127.152.000	1.301.964.172	1.029.060.198	71,38	97,18	97,22	82,19	79,88	- 61.793.000	-22201011,8
Peningkatan disiplin aparatur	287.665.000					285.165.000					99,13					- 57.533.000	-57033000
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	37.030.000	272.260.000	230.200.000	130.325.000		36.234.000	255.000.000	220.270.000	128.220.000		97,85	93,66	95,69	98,38		- 7.406.000	-7246800
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	32.165.000					31.555.000					98,10					- 6.433.000	-6311000
Perencanaan dan pelaporan perangkat daerah		310.105.000	106.275.000	75.982.250	72.311.500		298.177.000	105.634.850	75.982.250	72.311.500		96,15	99,40	100,00	100,00	14.462.300	14462300
Perencanaan Kegiatan SKPD	161.364.000					161.234.000					99,92					- 32.272.800	-32246800
Penyelenggaraan Hari-Hari Besar	107.220.000					105.357.500					98,26					- 21.444.000	-21071500
Penyelenggaraan kegiatan keagamaan, daerah dan nasional		184.170.000	131.127.000	207.640.000	140.872.000		173.730.000	123.201.000	207.640.000	139.922.000		94,33	93,96	100,00	99,33	28.174.400	27984400
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	7.448.955.000					3.309.951.500					44,44					-1.489.791.000	-661990300
Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	268.376.000					255.036.000					95,03					- 53.675.200	-51007200
Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	794.323.000					750.241.000					94,45					- 158.864.600	-150048200
Pengembangan data/informasi	234.160.000					231.360.000					98,80					- 46.832.000	-46272000
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		1.647.985.000		79.870.000	29.135.000		1.641.763.000		79.870.000	21.335.000		99,62		100,00	73,23	5.827.000	4267000
Penanganan kedaruratan		2.077.950.000	1.828.332.700	2.036.018.750	2.808.256.250		1.776.819.200	1.806.651.450	1.917.755.707	2.457.670.580		85,51	98,81	94,19	87,52	561.651.250	491534116
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam		249.746.000	208.011.000	223.173.000	117.940.000		244.868.000	104.941.000	218.384.000	117.140.000		98,05	50,45	97,85	99,32	23.588.000	23428000
Penanganan Bencana Kebakaran		1.517.605.000	5.107.883.000	1.749.245.000	1.997.380.000		1.499.897.750	4.994.998.500	1.726.810.000	1.785.755.028		98,83	97,79	98,72	89,40	399.476.000	357151005,6
Pendukung Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Bidang Kebencanaan		305.597.000	346.082.500	1.048.010.500	799.140.000		302.852.000	336.768.500	704.205.000	793.079.000		99,10	97,31	67,19	99,24	159.828.000	158615800
	12.562.314.000	10.893.244.000	11.079.817.667	9.367.665.500	9.161.152.000	7.700.854.196	9.968.384.747	10.526.139.820	8.552.381.059	8.222.274.624	61,30	91,51	95,00	91,30	89,75		

Tabel 2.10.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2016 s/d 2020
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=(12/7)*100		14 = 6 + 12		15=(14/5) x 100%			
				K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
TAHUN 2016																											
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																									
1	Surat menyurat dinas	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat menyurat dinas	132 org	213,11	240 org	222,54	132 org	213,11	30 org	34,20	30 org	68,40	30 org	35,10	30 org	75,41	120 org	213,11	90,91	100,00	360 org	435,65	272,73 %	204,42	Sekretariat	
2	Listrik dan telepon	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana komunikasi	12 bln	209,07	48 bln	354,29	12 bln	209,07	3 bln	62,66	3 bln	31,65	3 bln	37,45	3 bln	42,53	12 bln	174,29	100,00	83,36	60 bln	528,58	500,00 %	252,82	Sekretariat	
3	Kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan Kantor	24 org	10,50	288 org	165,21	24 org	10,50	6 org	0,95	6 org	0,95	6 org	3,25	6 org	5,35	24 org	10,50	100	100,00	312 org	175,71	1300,00 %	1.673,44	Sekretariat	
4	Alat Tulis Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 bln	37,27	48 bln	237,44	12 bln	37,27			6 bln	20,00	3 bln		3 bln	17,27	12 bln	37,27	100	100,00	60 bln	274,71	500,00 %	737,09	Sekretariat	
5	Cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang dan cetakan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang dan cetakan penggandaan	12 bln	53,43	48 bln	126,91	12 bln	53,43			6 bln	21,79	3 bln		4,70	3 bln	26,69	12 bln	53,18	100	99,53	60 bln	180,09	500,00 %	337,05	Sekretariat
6	Komponen listrik	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bln	10,50	48 bln	27,89	12 bln	10,50			6 bln	4,90	3 bln		0,25	3 bln	0,25	12 bln	5,40	100	51,42	60 bln	33,29	500,00 %	317,06	Sekretariat
7	Peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan	tersedianya dan perlengkapan kantor	1 thn	80,80	3 thn	219,29	1 thn	80,80	0,25 bln	0,95	0,50 bln	39,79			0,25 bln	30,50	1 thn	71,24	100	88,17	4 thn	290,53	400,00 %	359,57	Sekretariat	
8	Peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga kebutuhan			1 paket	20,00											0 paket	-	-	-	1 paket	20,00	#DIV/0!	%	#DIV/0!	Sekretariat
9	Surat kabar, iklan dan buku peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya media untuk pemasangan iklan, tersedianya bacaan berupa koran dan buku peraturan perundang-	12 bln	50,90	48 bln	78,45	12 bln	50,90	3 bln	6,00	3 bln	6,37	3 bln	1,91	3 bln	26,23	12 bln	40,51	100	79,59	60 bln	118,96	500,00 %	233,71	Sekretariat	
10	Makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	kebutuhan jaman dan makanan	12 bln	152,82	48 bln	271,08	12 bln	152,82	3 bln	7,40	3 bln	7,40	3 bln	45,81	3 bln	56,47	12 bln	117,08	100	76,61	60 bln	388,16	500,00 %	254,00	Sekretariat	
11	Perjalanan dinas ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	12 bln	362,72	48 bln	714,26	12 bln	362,72	3 bln	35,00	3 bln	35,00	3 bln	81,61	3 bln	210,92	12 bln	362,53	100	99,95	60 bln	1.076,79	500,00 %	296,86	Sekretariat	
12	Perjalanan dinas dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam	12 bln	412,72	48 bln	869,92	12 bln	412,72	3 bln	-	3 bln	34,94	3 bln	186,90	3 bln	87,72	12 bln	309,56	100	75,00	60 bln	1.179,48	500,00 %	285,78	Sekretariat	

Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2026

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = (12/7)*100		14 = 6 + 12		15 = (14/5) x 100%		16					
				K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp	K	Rp (juta)	K	Rp						
II	Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur																													
	1 Review DED Pos Damkar di Anyer	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya dokumen review DED Pos Damkar			6 dokumen	51,22														6 %	51,22	#DIV/0!	%	#DIV/0!	Sekretariat					
	2 Perengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100 %	221,27	400 %	606,34	100 %	221,27		- 75 %	200,00		- 25 %	16,51	100 %	216,51	100	97,85	500 %	822,85	500,00 %	371,88			Sekretariat					
	3 Peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tingkat penyediaan peralatan gedung kantor			400 %	394,70									- %	-	-	-	400 %	394,70	#DIV/0!	%	#DIV/0!	Sekretariat						
	4 Mebeulair kantor	Pengadaan mebeulair	Jumlah bidang yang terpelihara mebeulair			300 %	47,27									- %	-	-	-	300 %	47,27	#DIV/0!	%	#DIV/0!	Sekretariat						
	5 Pemeliharaan gedung kantor	rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100 %	410,23	400 %	905,62	100 %	410,23	75 %	64,65	5 %	4,80	10 %	9,60	5 %	125,60	95 %	204,65	95	49,89	495 %	1.110,28	495,00 %	270,65		Sekretariat				
	6 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100 %	939,53	400 %	2.069,15	100 %	939,53	3 bin	141,99	3 bin	135,90	3 bin	179,30	3 bin	235,64	12 %	692,83	12	73,74	412 %	2.761,98	412,00 %	293,97		Sekretariat				
	7 Pemeliharaan peralatan gedung kantor	rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	100 %	26,19	400 %	54,35	100 %	26,19	100 %	25,82	0 %	0,25		-	-	100 %	26,07	100	99,55	500 %	80,42	500,00 %	307,07		Sekretariat					
	8 Rehabilitasi gedung kantor	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor			300 %	728,54									-	-					300 %	728,54	#DIV/0!	%	#DIV/0!	Sekretariat				
	9 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional			100 %	196,90									-	-	- %	-	-	-	100 %	196,90	#DIV/0!	%	#DIV/0!	Sekretariat				
III	Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																													
	1 Mesin/kartu absensi	Pengadaan mesin/kartu absensi	Terpenuhinya kebutuhan mesin/kartu absensi			2 buah	7,00														- buah	-	-	-	2 buah	7,00	#DIV/0!	%	#DIV/0!	Sekretariat	
	2 Pakaian beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Terwujudnya disiplin aparat dalam berpakaian dinas	110 stel	85,24	334 stel	290,82	110 stel	85,24	110 stel	82,50	0 stel	2,74		-	-	110 stel	85,24	100	100,00	444 stel	376,06	403,64 %	441,18			Sekretariat				
	3 Pakaian lapangan (PDL)	Pengadaan Pakaian Kerja lapangan	Terpenuhinya kebutuhan pakaian lapangan	100 buah	202,43	2 paket	314,38	100 buah	202,43		-	100 buah	197,50	-	buah	2,43		-	100 buah	199,93	-	-	-	102 paket/buah	514,30	102,00 %	254,07		Sekretariat		
4 Pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu	5 stel		272 stel	62,50	5 stel														- stel	-	-	-	272 stel	62,50	5440,00 %	#DIV/0!	%	#DIV/0!	Sekretariat
IV	Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																													
	1 Diklat formal untuk pegawai	Pendidikan dan Pelatihan Formal	terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	10 org	37,03	40 org	61,95	10 org	37,03	1 org	6,23	1 org	-		-	12 org	30,00	14 org	36,23	140	97,85	54 org	98,18	540,00 %	265,15			Sekretariat			
	2 Instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	terlaksananya sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana			60 org	143,96															- org	-	-	-	60 org	143,96	#DIV/0!	%	#DIV/0!	Sekretariat
3 Bimtek peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	terlaksananya Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan			50 org	149,79															- org	-	-	-	50 org	149,79	#DIV/0!	%	#DIV/0!	Sekretariat	

Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2026

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100		14 = 6 + 12		15=(14/5) x 100%		16	
				K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)		K
V	Laporan Kinerja Keuangan	Capaian dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																									
	1 Laporan kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan kinerja SKPD	100 buku	28,55	400 buku	32,34	100 buku	28,55			50 buku	13,31	25 buku	1,18	25 buku	13,86	100 buku	28,34	100	99,26	500 buku	60,68	500,00	%	212,54	Sekretariat
	2 Laporan keuangan semesteran	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran			4 semester	6,14															4 semester	6,14	#DIV/0!	%	#DIV/0!	Sekretariat
3 Laporan keuangan tahunan	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 thn	3,61	4 thn	22,33	1 thn	3,61					1 thn	3,21			1 thn	3,21	100	88,93	5 thn	25,54	500,00	%	706,81	Sekretariat	
VI	Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan SKPD	Program Perencanaan Kegiatan SKPD																									
	1 Dokumen Renstra dan Renja SKPD	Penyusunan renstra dan renja SKPD	Tersedianya dokumen renstra dan renja SKPD	50 dokumen	161,36	45 dokumen	239,84	50 dokumen	161,36	25 dokumen	91,60	5 dokumen	15,68		20 dokumen	53,96	50 dokumen	161,23	100	99,92	95 dokumen	401,07	190,00	%	248,55	Sekretariat	
VII	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar	Program Penyelenggaraan hari-hari besar																									
	1 Hari Besar Islam	Penyelenggaraan hari besar islam	Terlaksananya penyelenggaraan hari besar	1 thn	50,86	3 thn	113,86	1 thn	50,86	1 thn	50,11						1 thn	50,11	100	98,53	4 thn	163,97	400,00	%	322,38	Sekretariat	
	2 Hari besar nasional	Penyelenggaraan hari besar nasional	Terlaksananya penyelenggaraan hari besar nasional	1 thn	10,25	3 thn	19,70	1 thn	10,25					1 thn	10,25			1 thn	10,25	100	100,00	4 thn	29,95	400,00	%	292,20	Sekretariat
3 HUT Kabupaten Serang dan Damkar	Penyelenggaraan hari ulang tahun kabupaten serang	Terlaksananya penyelenggaraan hari besar HUT Kab.Serang	1 thn	46,11	3 thn	113,66	1 thn	46,11			0,5 thn	22,45		0,5 thn	22,55	1 thn	45,00	100	97,59	4 thn	158,66	400,00	%	344,08	Sekretariat		
VIII	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya																									
	1 Masyarakat dan pegawai BPBD Kab. Serang	Sosialisasi standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksananya sosialisasi norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	100 org	97,38			100 org	97,38					100 org	95,72			100 org	95,72	100	98,30	100 org	95,72	100,00	%	98,30	Bid. Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Lab.
	2 Retribusi APK	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Terlaksananya pemeriksaan alat pemadam kebakaran	12 bln	85,25	36 bln	540,81	12 bln	85,25	3 bln	11,25	3 bln	16,88	3 bln	21,68	3 bln	35,25	12 bln	85,05	100	99,77	48 bln	625,86	400,00	%	734,15	Bid. Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Lab.
	3 Diklat anggota damkar	Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Terlaksananya Diklat Pemadam 1 untuk anggota damkar	20 org	182,95	110 org	492,48	20 org	182,95					20 org	182,95			20 org	182,95	100	100,00	130 org	675,43	650,00	%	369,19	Bid. Penanggulangan bencana & Damkar
	4 Sarana dan prasarana pencegahan kebakaran	Pengadaan sarana dan prasarana untuk pencegahan kebakaran	Tersedianya sarana dan prasarana untuk pencegahan kebakaran	100 %	5.767,94	200 %	4.556,33	100 %	5.767,94					20 %	1.760,84	10 %	2,82	30 %	1.763,66	-	-	230 %	6.319,98	230,00	%	109,57	Penanggulangan bencana & Damkar
	5 Penyuluhan pencegahan kebakaran	Penyuluhan pencegahan kebakaran	Terlaksananya penyuluhan pencegahan kebakaran			18 kcmtn	437,30															18 kcmtn	437,30	#DIV/0!	%	#DIV/0!	Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Lab.
	6 Rehab berat 1 unit mobil damkar	Pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bahaya	Terlaksananya rehab berat 1 unit damkar			1 Unit	199,50															1 unit	199,50	#DIV/0!	%	#DIV/0!	Penanggulangan bencana & Damkar
	7 1 unit mobil damkar	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksananya rehab berat 1 unit damkar	1 unit	204,03			1 unit	204,03						1 unit	201,34		1 unit	201,34	100	98,68	1 unit	201,34	100,00	%	98,68	Penanggulangan bencana & Damkar
8 Piket pelayanan damkar	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Terlaksananya piket pencegahan dan penanggulangan kebakaran	600 org/bln	1.111,42	2400 org/bln	3.027,75	600 org/bln	1.111,42	150 org/bln	152,57	150 org/bln	311,24	150 org/bln	157,98	150 org/bln	359,45	600 org/bln	981,23	100	88,29	3.000 org/bln	4.008,98	500,00	%	360,71	Bid. Penanggulangan bencana & Damkar	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100		14 = 6 + 12		15 =(14/5) x 100%		16		
				K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)	K	Rp (juta)			
IX	Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana pascabencana	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar																										
	1 Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian pascabencana	Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial	Terlaksananya koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial	100 %	268,38	275 %	800,76	100 %	268,38					50 %	145,97	50 %	109,07	100 %	255,04	100	95,03	375 %	1.055,80	375,00 %	393,40		Bid. Sarpras, RR	
X	Dokumen kebencanaan	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana																										
	1 Penyusunan dokumen	Koordinasi penyusunan profil daerah rawan bencana	Jumlah tersusunnya dokumen kebencanaan			200 dokumen	183,68														200 dokumen	183,68	#DIV/0! %	#DIV/0!		Sekretariat		
XI	Pencegahan dan penanggulangan korban bencana alam	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam																										
	1 Sosialisasi dan pemantauan daerah rawan bencana	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana	Terlaksananya piket kesiapsiagaan bencana dan pembayaran honor operator GIS	100 %	419,02	375 %	1.684,40	100 %	419,02	50 %	32,21	25 %	16,45		25 %	366,32	100 %	414,98	100	99,03	475 %	2.099,38	475,00 %	501,02		Bid. Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Lab.		
	2 Sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam	Pengadaan sarana evakuasi penduduk/ancaman/korban bencana alam	Terlaksananya sarana dan prasarana untuk evakuasi penduduk korban bencana alam	100 %	375,30	275 %	1.474,48	100 %	375,30			75 %	222,46	5 %	62,22	20 %	50,58	100 %	335,26	100	89,33	375 %	1.809,74	375,00 %	482,21		Bid. Sarpras, RR	
3 Action Plan Cijung dan Apel Kesiapsiagaan Bencana	DAS Tanggap darurat bencana	Terlaksananya Blmtek tanggap darurat (Action Plan DAS Cijung) dan Apel Kesiapsiagaan Bencana																										Bid. Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Lab.
XII	Produk hukum daerah	Program penataan dan pembuatan produk hukum daerah																										
	1 Penyusunan Perda PB	Penyusunan dan pembuatan produk hukum daerah	Tersedianya dokumen perda SKPD	1 dok. Perbup	63,39	- dokumen		1 dok. Perbup	63,39						1 dokumen		1 dokumen		100		1 dokumen		100,00 %				Sekretariat	
XIII	Penyusunan analisis data bencana	Program pengembangan data/informasi																										
	1 Pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen bencana	Penyusunan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan	Terlaksananya pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen bencana	1 aplikasi	234,16			1 aplikasi	234,16						1 aplikasi	231,36	1 aplikasi	231,36	100		1 aplikasi	231,36	100,00 %	98,80		Sekretariat		

TAHUN 2017-2020																																				
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																																		
1	Listrik dan telepon	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	bln	2.050,00	36	bln	578,68	12	bln	225,00	3	bln	50,36	3	bln	49,50	3	bln	51,36	3	bln	52,14	12	bln	203,35	100	90,38	48	bln	782,03	66,67	%	38,15	Sekretariat
2	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Tingkat penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	72	bln	6.200,00	36	bln	1.565,40	12	bln																			36	bln	1.565,40	50,00	%	25,25	Sekretariat
3	Kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tingkat penyediaan jasa kebersihan kantor	72	bln	800,00	36	bln	209,25	12	bln	82,00	3	bln	13,99	3	bln	17,97	3	bln	21,95	3	bln	22,08	12	bln	76,00	100	92,68	48	bln	285,25	66,67	%	35,66	Sekretariat
4	Pramubakti dan pengemudi	Penyediaan jasa pramubakti dan pengemudi	Tingkat penyediaan jasa pramubakti dan pengemudi	72	bln	2.000,00	36	bln	758,51	12	bln	254,40	3	bln	42,40	3	bln	63,60	3	bln	63,60	3	bln	63,60	12	bln	233,20	100	91,67	48	bln	991,71	66,67	%	49,59	Sekretariat
5	Alat Tulis Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Tingkat penyediaan alat tulis kantor	72	bln	800,00	36	bln	164,68	12	bln	74,80	3	bln	17,10	3	bln	15,20	3	bln	20,75	3	bln	21,75	12	bln	74,80	100	100	48	bln	239,48	66,67	%	29,94	Sekretariat
6	Cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tingkat penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72	bln	650,00	36	bln	343,57	12	bln	68,72	3	bln	3,89	3	bln	20,31	3	bln	17,57	3	bln	26,95	12	bln	68,72	100	100	48	bln	412,29	66,67	%	63,43	Sekretariat
7	Komponen listrik	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tingkat penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72	bln	325,00	36	bln	29,81	12	bln	20,00	3	bln	0,66	3	bln	2,41	3	bln	2,89	3	bln	13,49	12	bln	19,44	100	97,20	48	bln	49,25	66,67	%	15,15	Sekretariat
8	Surat kabar, iklan dan buku peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tingkat penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72	bln	590,00	36	bln	289,18	12	bln	20,50	3	bln	2,52	3	bln	7,32	3	bln	4,68	3	bln	3,47	12	bln	17,99	100	87,76	48	bln	307,17	66,67	%	52,06	Sekretariat
9	Makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Tingkat penyediaan makanan dan minuman	72	bln	750,00	36	bln	237,34	12	bln	94,90	3	bln	16,25	3	bln	7,85	3	bln	25,50	3	bln	42,65	12	bln	92,25	100	97,21	48	bln	329,59	66,67	%	43,94	Sekretariat
10	Perjalanan dinas ke luar daerah	perjalanan dinas rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tingkat pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	72	bln	3.400,00	36	bln	1.564,95	12	bln	450,00	3	bln	105,03	3	bln	20,47	3	bln	131,28	3	bln	171,48	12	bln	428,26	100	95,17	48	bln	1.993,21	66,67	%	58,62	Sekretariat
11	Perjalanan dinas dalam daerah	Perjalanan dinas rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tingkat pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	72	bln	2.900,00	36	bln	1.398,21	12	bln	417,55	3	bln	65,98	3	bln	66,72	3	bln	112,99	3	bln	146,31	12	bln	391,99	100	93,88	48	bln	1.790,20	66,67	%	61,73	Sekretariat

Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2026

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100		14 = 6 + 12		15 =(14/5) x 100%		16												
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
12	Publikasi program pembangunan prioritas daerah	Publikasi program pembangunan prioritas daerah melalui media cetak, elektronik dan media online	Tingkat pelaksanaan Publikasi program pembangunan prioritas daerah			12	bln	195,50	12	bln	200,00	3	bln	63,00	3	bln	37,00	3	bln	19,00	12	bln	200,00	100	100	24	bln	395,50	#DIV/0!	%	#DIV/0!	%	Sekretariat					
II	Sarana dan Prasarana Aparatur	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																																				
1	Perengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tingkat pengadaan perlengkapan gedung kantor	5	thn	1.700,00	3	thn	237,94	1	thn	24,95	0,25	thn	23,50	0,25	thn	1,45	0,25	thn	0,25	thn	-	1	thn	24,95	100	100	4,0	thn	262,89	80,00	%	15,46	Sekretariat			
2	Peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tingkat penyediaan peralatan gedung kantor	5	thn	1.900,00	2	thn	490,61	1	thn	73,70	0,25	thn	53,60	0,25	thn	1,45	0,25	thn	0,25	thn	-	1	thn	55,05	100	74,69	3,0	thn	545,66	60,00	%	28,72	Sekretariat			
3	Rehabilitasi gedung kantor	Rehabilitasi gedung kantor	Tingkat pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						1	thn	123,09			0,50	thn	113,05	0,25	thn	10,04	0,25	thn	-	1,0	thn	123,09	100	100	1	thn	123,09	0,00	%	-	Sekretariat				
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tingkat pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5	thn	5.000,00	3	thn	1.065,65	1	thn	51,68	0,25	thn	47,31	0,25	thn	1,88	0,25	thn	2,49	0,25	thn	-	1	thn	51,68	100	100	4	thn	1.117,33	80,00	%	22,35	Sekretariat		
5	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tingkat penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				12	bln	872,42	12	bln	978,23	3	bln	74,56	3	bln	199,52	3	bln	216,97	3	bln	256,65	12	bln	747,70	100	76,43	24	bln	1.620,12	0,00	%	-	Sekretariat		
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Tingkat pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5	thn	700,00	1	thn	35,46																													
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tingkat pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				2	thn	62,92	1	thn	19,36	0,25	thn	1,50	0,25	thn	-	0,25	thn	8,05	0,25	thn	0,20	1,0	thn	9,75	100	50,33	3	thn	72,66	0,00	%	-	Sekretariat		
8	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tingkat pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				1	thn	17,24					0,25	thn			0,25	thn	10,41	0,25	thn	6,44	0,25	thn	-	1,0	thn	16,85	100	97,72	1	thn	16,85	0,00	%	-	Sekretariat
III	Kapasitas sumber daya aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																																				
1	Pakaian khusus	Pengadaan pakaian khusus	Tingkat pengadaan pakaian khusus bagi aparatur	5	thn	3.000,00	3	thn	603,49																													
2	Administrasi kepegawaian	Pengelolaan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	5	thn	350,00																																
IV	Perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	Program Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah																																				
1	Dokumen perangkat daerah	SOP Penyusunan sistem dan prosedur perangkat daerah (SOP)	Tingkat ketersediaan dokumen SOP perangkat daerah	5	Dokumen	500,00	1	Dokumen	76,48																													

Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2026

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100		14 = 6 + 12		15 =(14/5) x 100%		16						
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
2	Dokumen survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Survey kepuasan masyarakat layanan perangkat daerah	Tingkat ketersediaan dokumen survey kepuasan masyarakat layanan perangkat daerah	5	Dokumen 500,00	2	Dokumen 99,26																2	Dokumen 99,26	40,00	%	19,85	Sekretariat				
3	Dokumen laporan SPM perangkat daerah	Pengukuran capaian standar pelayanan minimal (SPM) perangkat daerah	Tingkat ketersediaan dokumen laporan SPM perangkat daerah	5	Dokumen 500,00	1	Dokumen 1,91																1	Dokumen 1,91	20,00	%	0,38	Sekretariat				
4	Dokumen pembangunan perangkat daerah	Penyusunan dan pemutakhiran data pembangunan perangkat daerah	Tingkat ketersediaan dokumen pembangunan perangkat daerah	5	Dokumen 500,00	1	Dokumen 6,54																1	Dokumen 6,54	20,00	%	1,31	Sekretariat				
5	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan renja perangkat daerah	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah	5	thn 1.125,00	3	thn 229,17	1	thn 22,89	0,25	thn 7,80	0,25	thn 8,71	0,25	thn 4,26	0,25	thn 2,12	1,0	thn 22,89	100	100		4	thn 252,06	80,00	%	22,41	Sekretariat				
6	Dokumen LAKIP, LPPD dan laporan kinerja perangkat daerah lainnya	Penyusunan LAKIP perangkat daerah	Tingkat ketersediaan dokumen LAKIP, LPPD dan laporan kinerja perangkat daerah lainnya	55	Dokumen 550,00	33	Dokumen 62,05	11	Dokumen 31,43	5	dokumen 2,28	2	dokumen 2,80	2	dokumen 7,20	2	dokumen 19,16	11	Dokumen 31,43	100	100		44	Dokumen 93,49	80,00	%	17,00	Sekretariat				
7	Dokumen RKA/DPA perangkat daerah	Penyusunan RKA/DPA perangkat daerah	Tingkat ketersediaan dokumen RKA/DPA perangkat daerah					3	Dokumen 17,99														3	Dokumen 17,99	0,00	%	-	Sekretariat				
8	Dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah	Tingkat ketersediaan dokumen laporan keuangan perangkat daerah	15	dokumen 250,00	6	dokumen 4,38																6	Dokumen 4,38	40,00	%	1,75	Sekretariat				
V	Kegiatan keagamaan, daerah dan nasional	Program Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, dan Daerah nasional																														
1	MTQ Kabupaten Serang dan Provinsi Banten	Dukungan penyelenggaraan MTQ	Tingkat dukungan penyelenggaraan MTQ	10	kegiatan 1.000,00	4	kegiatan 195,90	1	kegiatan 69,95	1	kegiatan 69,00												1	kegiatan 69,00	100	98,64	5	kegiatan 264,90	50,00	%	26,49	Sekretariat
2	Peringatan HUT RI	Dukungan penyelenggaraan peringatan hari besar nasional	Tingkat dukungan penyelenggaraan peringatan hari besar nasional	5	Kegiatan 500,00	3	Kegiatan 34,73	1	Kegiatan 26,30														1	Kegiatan 25,85	100	100	4	Kegiatan 61,03	80,00	%	12,21	Sekretariat
3	HUT Damkar dan HUT Kabupaten Serang	Dukungan penyelenggaraan HUT Damkar Tahun Daerah	Tingkat dukungan penyelenggaraan HUT Damkar, HUT Kab. Serang dan Festival Anyer Culture	10	Kegiatan 1.250,00	8	Kegiatan 273,94	1	Kegiatan 44,62	1	Kegiatan 43,52												1	Kegiatan 44,62	100	100	9	Kegiatan 318,56	90,00	%	25,48	Sekretariat
4	Penyelenggaraan Anyer Krakatau Culture Festival	Dukungan penyelenggaraan Anyer Krakatau Culture Festival	Tingkat dukungan penyelenggaraan Anyer Krakatau Culture Festival					0	Kegiatan -																							
VI	Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																														
1	Piket siaga bencana, sosialisasi dan Forum PRB, serta early warning system banjir dan longsor	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Terlaksananya piket kesiapsiagaan bencana, sosialisasi PRB, Forum PRB, pengaduan early warning system banjir dan longsor	910	org 6.226,54	76	org 189,16																									

Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2026

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100		14=6+12		15=(14/5) x 100%		16										
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp (Juta)	K	Rp											
2	Relawan bencana, lifeguard Kec. Anyar dan Cnangka TKTd Kab. Serang dan tim gabungan penanggulangan bencana	Bimbingan teknis kebencanaan	Terlaksananya bimtek relawan bencana, manajemen bencana, pembentukan relawan bencana, pembentukan lifeguard Kec. Anyar dan Cnangka, TKTd Kab. Serang, pembentukan tim gabungan penanggulangan bencana	2800	org	5.815,62	80	org	161,02														80	org	161,02	2,86	%	2,77	Bid. Pencegahan & Kesiapsiagaan							
3	Dokumen masterplan dan actionplan kebencanaan, peta rawan banjir dan longsor, peta jalur evakuasi tsunami	Fasilitasi pemetaan daerah rawan bencana	Tingkat penyusunan dokumen masterplan dan actionplan kebencanaan, ketersediaan peta rawan banjir dan longsor, serta peta jalur evakuasi tsunami	20	Dokumen	11.140,00	3	Dokumen	937,77														3	Dokumen	937,77	15,00	%	8,42	Bid. Pencegahan & Kesiapsiagaan							
4	Desa tangguh bencana	Penguatan kelembagaan serta pengembangan kapasitas teknis	Terlaksananya sosialisasi desa tangguh bencana	5	kegiatan	1.000,00	1	kegiatan	124,65														1	kegiatan	124,65	20,00	%	12,46	Bid. Pencegahan & Kesiapsiagaan							
5	Tim penanggulangan bencana	Pelatihan tim penanggulangan bencana	Terlaksananya pelatihan dan latihan gabungan tim penanggulangan bencana	1000	org	1.650,00	100	org	229,17														100	org	229,17	10,00	%	13,89	Bid. Pencegahan & Kesiapsiagaan							
6	Edukasi dan drill tsunami	Peningkatan kapasitas sumber daya aparat dan masyarakat dalam menghadapi bencana	Terlaksananya edukasi dan drill tsunami		2	keg	79,87	1	keg	29,14							1	Kegiatan	21,34	1	Kegiatan	21,34	100	73,23	3	Kegiatan	101,21	0,00	%	-	Bid. Pencegahan & Kesiapsiagaan					
VII																																				
1	Pelayanan tanggap darurat bencana	Program Penanganan Kedaruratan	Tingkat pelaksanaan pelayanan tanggap darurat bencana	60	bln	36.635,09	36	bln	3.897,97	12	bln	2.240,56	3	bln	341,12	3	bln	611,045	3	bln	547,89	3	bln	519,29	12	bln	2.019,35	100	90,13	48	bln	5.917,32	80,00	%	16,15	Bid. Penanganan Darurat (Kedaruratan)
2	Sistem informasi manajemen penanggulangan bencana	Penyusunan dan pengembangan data dan informasi bencana	Tingkat penyusunan dan pengembangan data dan informasi bencana	5	thn	4.432,50	2	thn	206,33															2	thn	206,33	40,00	%	4,65	Bid. Penanganan Darurat (Kedaruratan)						
3	Logistik tanggap darurat bencana	Penyediaan logistik penanganan kedaruratan bencana	Tingkat penyediaan logistik tanggap darurat bencana	5	Thn	1.900,00	4	thn	310,50	1	Thn	479,40	0,25	thn	50,00	0,25	thn	164,40	0,25	thn	0,25	thn	152,40	1,0	paket	366,80	100	76,51	5	paket	677,30	100,00	%	35,65	Bid. Penanganan Darurat (Kedaruratan)	
4	Sarpras evakuasi korban bencana	Penyediaan sarana dan prasarana evakuasi bencana	Tingkat penyediaan sarpras evakuasi korban bencana	5	thn	7.650,00	2	thn	1.047,92	1	thn	40,95	0,25	thn	-	0,25	thn	40,00	0,25	thn	0,95	0,25	thn	-	1,0	thn	40,95	100	100	3	thn	1.088,87	60,00	%	14,23	Bid. Penanganan Darurat (Kedaruratan)
5	Pemeliharaan sarpras evakuasi korban bencana	Perbaikan sarpras penanganan kedaruratan bencana	Tingkat pemeliharaan sarpras evakuasi korban bencana	5	paket	2.746,69	1	paket	28,00															1	paket	28,00	20,00	%	1,02	Bid. Penanganan Darurat (Kedaruratan)						
6	Personil tim penanggulangan bencana	Rekrutmen tim penanggulangan bencana	Jumlah personil tim penanggulangan bencana	270	org	900,00		org	-																										Bid. Penanganan Darurat (Kedaruratan)	
7	Bantuan kebutuhan darurat bencana	Pendistribusian bantuan kebutuhan darurat bencana	Tingkat pendistribusian bantuan kebutuhan bencana	5	Thn	20.000,00	1	thn	10,50	1	Thn	47,35	0,25	Thn	0,25	Thn	-	0,25	Thn	12,32	0,25	Thn	18,26	1,0	thn	30,57	100	64,57	2	thn	41,07	40,00	%	0,21	Bid. Penanganan Darurat (Kedaruratan)	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(12/7)*100		14 = 6 + 12		15 =(14/5) x 100%		16													
				K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
VIII	Penanganan pasca bencana	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam																																					
1	Lokasi pasca bencana	Penilaian kerusakan akibat bencana	Tingkat penilaian kerusakan pasca bencana	5	thn	4.402,94	3	thn	517,44	1	thn	65,20	0,25	thn	-	0,25	thn	19,60	0,25	thn	-	0,25	thn	45,00	1,0	thn	64,60	100	99,08	4	thn	582,04	80,00	%	13,22	Bid. RR			
2	Data kebutuhan kajian bencana	Kajian kebutuhan pasca bencana	Tingkat ketersediaan data kajian pasca bencana	100	Dokumen	1.100,00		Dokumen	-																														
3	Money pemulhan pasca bencana	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pemulhan Pasca Bencana	Tingkat pelaksanaan hasil pemulhan pasca bencana	1	thn	375,00		thn	-																														
4	Pengungsi bencana	Penanganan Pengungsi Akibat Bencana	Tingkat penanganan jumlah pengungsi akibat bencana	5	keg	4.300,00	1	keg	56,18	2	keg	26,55																											
5	Pemulihan pasca bencana	Pemulihan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi akibat bencana	Tingkat pemulihan kondisi fisik sosial ekonomi pasca bencana	5	thn	11.912,50	3	thn	79,33	1	thn	26,19	0,25	thn		0,25	thn	-	0,25	thn	26,19	0,25	thn		1	thn	26,19	100	100	4	thn	105,52	80,00	%	0,89	Bid. RR			
IX	Pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran	Program Penanganan Bencana Kebakaran																																					
1	Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran	Penanggulangan bencana kebakaran	Tingkat pelayanan penanggulangan bencana kebakaran	60	bln	27.847,80	36	bln	3.858,09	12	bln	1.914,15	3	bln	299,65	3	bln	462,80	3	bln	465,48	3	bln	474,61	12	bln	1.702,53	100	88,94	48	bln	5.560,61	80,00	%	19,97	Bid. Damkar			
2	Sarpras pencegahan bahaya kebakaran	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Tingkat ketersediaan sarpras pencegahan bahaya kebakaran	5	thn	59.050,00	3	thn	4.220,48	1	thn	83,23	0,25	thn		0,25	thn	81,73	0,25	thn	1,51	0,25	thn	-	1,00	thn	83,23	100	100	4	thn	4.303,71	80,00	%	7,29	Bid. Damkar			
3	Pengawasan dan pengujian APK	Penyediaan, pengawasan dan pengujian alat pemadam kebakaran	Tingkat pengawasan dan pengujian APK	5	thn	4.505,00	1	thn	143,14																														
4	Pelaksanaan penyelamatan kebakaran	Penyelamatan kebakaran	Tingkat pelaksanaan penyelamatan kebakaran	5	thn	12.205,00		thn	-																														
5	Pemeliharaan sarpras pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Pemeliharaan sarpras pencegahan bahaya kebakaran	Tingkat pemeliharaan sarpras penanganan bahaya kebakaran	5	paket	1.250,00		paket	-																														
X	Dukungan kebijakan pemerintah di bidang kebencanaan	Program Pendukung Kebijakan Pemerintah dan Provinsi Bidang Kebencanaan																																					
1	Masyarakat Cijung	DAS Social action plan DAS Cijung	Jumlah peserta pelaksanaan bimtek/sosialisasi action plan DAS Cijung dan apel kesiapsiagaan	3050	org	2.900,00	1.220	org	636,13	200	org	64,14																											
2	Masyarakat Cijung, Cidurian dan Cidanau	DAS Dukungan pelaksanaan program Management Selected River Basins Flood On	Jumlah sub kegiatan FMSRB yang dapat dilaksanakan	5	Tahun	57.442,32	2	Tahun	707,69	1	Tahun	735,00	0,25	thn	249,80	0,25	thn	58,52	0,25	thn	335,43	0,25	thn	85,19	1,00	thn	728,94	100	99,18	3,00	thn	1.436,63	60,00	%	2,50	Bid. Pencegahan & Kesiapsiagaan			

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Banten, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS adalah semua mengarah pada penanganan bencana yang efektif dan efisien. Penggunaan teknologi tinggi juga akan berdampak pada lingkungan dan keselamatan masyarakat. Sudah mulai diarahkan untuk mengembangkan struktur fisik dan non fisik yang berdampak langsung dalam pengurangan resiko bencana serta mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana.

Tantangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang dalam 5 tahun ke depan adalah berdasarkan kajian KLHS ada 11 macam bencana yang sering terjadi di Kabupaten Serang. Oleh karena itu perlu banyak dilakukan kegiatan untuk pengurangan resiko bencana dan mitigasi bencana. Dengan dilakukannya pengurangan resiko bencana dan mitigasi bencana diharapkan dapat mengurangi beban Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana dan kerusakan lingkungan.

Peluangnya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Serang mulai memberikan perhatian penuh terhadap penanggulangan bencana, dan hasil koordinasi yang baik antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang dengan stake holder terkait sehingga makin banyak mendapatkan bantuan dari stake holder terkait untuk penanganan bencana dan kebakaran.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Terkait dengan permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, pemetaan permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketersediaan Infrastruktur dasar bagi masyarakat belum merata	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan kebakaran belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana dan kebakaran. ➤ Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam, bencana social dan kejadian kebakaran. ➤ Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan kebakaran ➤ Kegiatan penanganan Resiko Banjir yang belum terpadu antar OPD

Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang secara kontekstual memegang posisi yang cukup penting karena menangani segala urusan yang menyangkut pada keselamatan jiwa dan kerugian harta benda akibat terkena bencana. Sebagai sebuah unit kerja yang diharapkan akan memiliki sifat peduli, cepat, sigap, adil dan benar sesuai dengan amanat aturan perundang-undangan. Sehingga kehidupan masyarakat akan merasa tenang dan aman dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Tantangan yang hakiki dalam penanganan bencana untuk masa depan kita, adalah bagaimana potensi semua unsur baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersinergi dalam penanggulangan bencana sehingga korban dan kerugian akibat bencana bisa dihindari atau diminimalisir.

Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang ada di masing-masing bidang dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang sesuai dengan bidang yang ada pada Struktur Organisasi di Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang dan Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang.

3.1.1. Permasalahan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Pra Bencana)

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai berikut:

1. Kondisi wilayah geografis Kabupaten Serang yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, ternyata cukup menyulitkan pemerintah daerah untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang bencana kepada masyarakat;
2. Kurangnya sumber daya manusia yang memahami tentang pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan bencana;
3. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Serang dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di OPD selain BPBD;
4. Luasnya cakupan wilayah penanganan pengurangan resiko bencana dengan jenis potensi bencana yang beragam; dan
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat Pemerintah dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana;
6. Belum adanya pemahaman tentang arti pentingnya mitigasi bencana;
7. Masih belum dipahaminya unsur-unsur pengukuran kemampuan kapasitas daerah dalam penanganan bencana;
8. Belum adanya masterplan kebencanaan dan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);

9. Perlu dilakukan review atau penyempurnaan SOP (Standar Operational Prosedur) pencegahan dan kesiapsiagaan.

3.1.2. Permasalahan Bidang Penanganan Darurat (Tanggap Darurat)

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Penanganan Darurat sebagai berikut:

1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Serang termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
4. Masih kurangnya logistik untuk penunjang evakuasi korban bencana;
5. Sulitnya prosedur penggunaan anggaran tanggap darurat bencana dari anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Daerah;
6. Masih kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan penanggulangan bencana dan masih berjalan secara sektoral;
7. Masih kurangnya personil Tim Reaksi Cepat (TRC) dan rescue/Tim SAR yang sudah terlatih dengan baik untuk penanganan tanggap darurat bencana;
8. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
9. Perlu dilakukan review atau penyempurnaan SOP (Standar Operational Prosedur) Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Serang.

3.1.3. Permasalahan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Pasca Bencana)

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai berikut:

1. Belum adanya data penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang akurat;
2. Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;
3. Kurangnya koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat;

4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk pelaksanaan operasional penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana;
5. Kurangnya personil yang memahami tentang teknis penghitungan penilaian kerusakan pasca bencana;
6. Kurangnya personil yang memahami tentang prosedur dan pelaksanaan penanganan pengungsi dan pemulihan kondisi pasca bencana;
7. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang berasal dari anggaran daerah;
8. Belum dipahaminya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
9. Sulitnya prosedur pemberian bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dari anggaran Bantuan Sosial Tidak Terencana milik Pemerintah Daerah;
10. Perlu dilakukan review atau penyempurnaan SOP (Standar Operational Prosedur) rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

3.1.4. Permasalahan Bidang Pemadam Kebakaran

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pemadam Kebakaran sebagai berikut:

1. Kurangnya personil anggota damkar untuk penanggulangan bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Serang;
2. Kurangnya personil inspektur pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran (APK) di BPBD Kabupaten Serang.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
4. Kurangnya pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas sumber daya personil anggota damkar;
5. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penanggulangan bahaya kebakaran yang berasal dari anggaran daerah;
6. Masyarakat belum memahami petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
7. Kurangnya sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat;
8. Sulitnya prosedur pemberian bantuan untuk pasca bencana kebakaran;

9. Perlu dilakukan review atau penyempurnaan SOP (Standar Operational Prosedur) rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, telah dirumuskan Visi kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

” Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera Berkeadilan dan Agamis”

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Serang tersebut, dirumuskan beberapa misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat;
- Misi 2 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional;
- Misi 3 : Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, penataan ruang dan permukiman yang memadai dan berkualitas;
- Misi 4 : Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan;
- Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan profesional;
- Misi 6 : Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara.

Sebagaimana diurai pada bagian terdahulu, bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang adalah melaksanakan tugas pemerintahan menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana mulai dari sebelum, pada saat dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana). Dalam kaitannya dengan visi dan misi Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang sebagai **satuan kerja penanggulangan bencana** memiliki tugas antara lain :

1. Menterjemahkan visi dan misi daerah tahun 2021-2026 ke dalam tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, serta indikasi program dan kegiatan dan melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana.
2. Melakukan verifikasi renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan serta indikasi program dan kegiatan dalam tahun 2021-2026 sesuai dengan substansi RPJMD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang **sebagai perangkat daerah**, maka sesuai tugas pokok dan fungsinya memiliki kewajiban dalam mendukung terlaksananya Misi ke-5, yaitu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana dituntut untuk memiliki arah kebijakan yang mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih, diantaranya dengan meningkatkan profesionalisme pelayanan publik dalam hal penanggulangan bencana, baik pada tahapan pra bencana, saat bencana/tanggap darurat, dan pasca bencana untuk mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala daerah terpilih, tentunya akan ditemui beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Telaah Visi, Misi dan Program KDH/WKDH Sesuai Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang

No.	Visi/ Misi/ Indikator Program Kerja KDH/Wakil KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat Dan Pendorong
1.	<p>Visi : Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera Berkeadilan dan Agamis</p> <p>Misi : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan profesional</p> <p>Indikator Program Kerja : 1. Response Time Tanggap Darurat Kebakaran 2. Indeks Risiko Bencana (IRB)</p>	<p>Penanggulangan Bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum tersedianya dokumen kajian risiko bencana, dokumen rencana penanggulangan bencana dan dokumen rencana kontijensi daerah. ➤ Belum optimalnya pelayanan mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. ➤ Masih kurangnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku bencana dan anggota damkar. ➤ Peningkatan jumlah daerah rawan bencana karena kondisi alam yang menurun dan perubahan iklim ➤ Masih kurang optimalnya pelayanan tanggap darurat bencana dan kebakaran. ➤ Masih kurang memadainya sarana dan prasarana pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran. ➤ Masih kurang optimalnya pelayanan penanganan pasca bencana. ➤ Masih kurangnya peningkatan kapasitas SDM personil yang menangani pasca bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan sistem pencegahan dan kesiapsiagaan serta penanggulangan bencana. ➤ Peningkatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. ➤ Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana. ➤ Pendataan dan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran ➤ Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan pelatihan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

- a. untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan undang-undang tersebut, telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dalam perumusan isu dan program strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang perlu dianalisis guna menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, maka tidak ada visi dan misi mandiri Kementerian/Lembaga. Visi dan misi seluruh Kementerian/ Lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden.

Visi Presiden 2020-2024 :

“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh karena itu, Visi BNPB 2020-2024 sejalan dan mendukung visi Presiden 2020-2024.

Visi BNPB 2020-2024 adalah :

“BNPB yang handal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong”

Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjalankan visi Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada fokus meningkatkan ketahanan bencana. Sejalan dengan visi BNPB 2020-2024, maka misi BNPB 2020-2024 sejalan dengan misi Presiden 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pasca bencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Tujuan BNPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sinergitas pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BNPB Tahun 2020-2024 melibatkan seluruh unit kerja BNPB dan juga didukung oleh lembaga lain baik di tingkat pusat maupun daerah. BNPB merupakan lembaga yang memiliki fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Tugas BNPB pada

dasarnya adalah melakukan penanggulangan bencana melalui tiga tahapan, yaitu: pra bencana, keadaan darurat, dan pasca bencana. Untuk menjamin tercapainya penanganan bencana yang andal, maka fungsi BNPB pada ketiga tahapan penanggulangan bencana harus didukung oleh semua sumber daya yang ada di BNPB.

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta dalam rangka keberhasilan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) baik di tingkat pusat maupun daerah.

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diharapkan mampu bersinergis dengan kebijakan pemerintah provinsi, dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yaitu :

“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQL KARIMAH”

Untuk mencapai Visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah Provinsi Banten sebagai berikut :

- Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
- Misi 2 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
- Misi 3 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas;
- Misi 4 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas;
- Misi 5 : Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Banten tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten masuk dalam Misi ke 1, yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Berdasarkan hasil analisa, isu strategis Provinsi Banten di Provinsi Banten dikelompokkan dalam lima aspek yaitu :

1. Isu strategis kesenjangan wilayah
2. Isu strategis daya saing daerah (sumber daya alam dan sumber daya manusia)
3. Isu Strategis kemiskinan dan pengangguran

4. Isu strategis tata kelola pemerintahan
5. Isu strategis kebencanaan.

Dari ke 5 isu strategis tersebut, tentu saja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten masuk dalam isu strategis yang ke 5 yaitu isu strategis kebencanaan.

Tabel 3.3.
MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
BPBD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
I.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Terwujudnya kelembagaan BPBD yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat.	a. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien b. Meningkatnya penanggulangan kebencanaan yang efektif	a. Capaian indeks Kepuasan Masyarakat (satuan : skala) b. Capaian SAKIP OPD c. Indeks Risiko Bencana

Tabel 3.4.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BPBD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022

VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQL KARIMAH			
MISI I : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya kelembagaan BPBD yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat.	a. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien b. Meningkatnya penanggulangan kebencanaan yang efektif	a. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat b. Meningkatkan mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	a. Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan b. Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana dan menurunkan titik terdampak bencana melalui system informasi kebencanaan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten diharapkan dapat diwujudkan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis masyarakat, Community Base Development (CBD), dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (stakeholder) dalam menciptakan Good Government sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya dapat dirasakan ke bawah (Trickle Down Effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar diutamakan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Serang adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Serang, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Kabupaten Serang secara geografis terletak pada koordinat 105° 0'0" - 106°22'0" bujur timur dan 05° 50'00" - 06° 21'00" lintang selatan dengan luas 147.214 (seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat belas) hektar. Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Serang meliputi 29 kecamatan.

Pemerintah Daerah menyusun strategi Penataan Ruang wilayah Kabupaten untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang wilayah kabupaten yang berkaitan dengan urusan kebencanaan adalah pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, dengan strategi meliputi :

- a. Mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat;
- b. Mengurangi resiko akibat pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
- c. Mengembangkan struktur fisik dan non fisik yang berdampak langsung dalam pengurangan resiko bencana; dan
- d. Mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana.

Sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan, rencana struktur ruang wilayah

Kabupaten Serang terdiri dari :

- a. Sistem perkotaan meliputi pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan, dan pusat pelayanan lingkungan dan pusat kegiatan lokal promosi. Sistem perkotaan terdiri dari PKN (Pusat Kegiatan Nasional), PKL (Pusat Kegiatan Lokal), dan pusat-pusat lain.
- b. Sistem jaringan prasarana meliputi rencana pengembangan sistem jaringan transportasi (darat, laut dan udara), sistem jaringan energi (Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi serta jaringan infrastruktur ketenagalistrikan), sistem jaringan telekomunikasi (jaringan telekomunikasi tetap dan jaringan telekomunikasi bergerak), sistem jaringan sumber daya air (Sistem jaringan Sumber Daya Air lintas provinsi, Sistem jaringan Sumber Daya Air lintas kabupaten, dan Sistem jaringan Sumber Daya Air kabupaten), dan sistem jaringan prasarana lainnya (Sistem penyediaan air minum, Sistem pengelolaan air limbah (SPAL), Sistem jaringan persampahan wilayah, Sistem jaringan drainase, dan Sistem jaringan evakuasi bencana).

Sistem jaringan evakuasi bencana Rencana sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf e terdiri atas jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana diarahkan pada :

- a. Jalur evakuasi bencana tanah longsor meliputi:
 1. Jalan Jaha – Sindangmandi di Kecamatan Anyar;
 2. Jalan Anyar – Jaha di Kecamatan Anyar;
 3. Jalan Bandulu – Mekarsari di Kecamatan Anyar;
 4. Jalan Rancasanggal – Cikolelet di Kecamatan Cinangka;
 5. Palima – Pasang Teneng di Kecamatan Cinangka;
 6. Jalan Pasauran – Sidatani di Kecamatan Cinangka dan Jalan Kaduranca – Gelusur di Kecamatan Padarincang;
 7. Jalan Mancak – Ciwarna di Kecamatan Mancak;
 8. Jalan Mancak – Cikedung di Kecamatan Mancak;
 9. Jalan Pasar Sore – Kaligede di Kecamatan Mancak;
 10. Jalan desa Batukuda – desa Mancak di Kecamatan Mancak;
 11. Jalan Barugbug – Pondok Kahuru di Kecamatan Ciomas;
 12. Ciomas – Mandalawangi di Kecamatan Ciomas;
 13. Gunungsari – Mancak – Anyar di Kecamatan Gunungsari; dan

14. Jalan lain yang menghubungkan dengan ruang-ruang evakuasi bencana tanah longsor.
- b. Ruang evakuasi bencana tanah longsor, meliputi :
 1. Bangunan kantor pemerintahan setempat; dan
 2. Ruang terbuka publik.
- c. Jalur evakuasi bencana banjir meliputi :
 1. Banten Lama – Pontang di Kecamatan Pontang;
 2. Jalan Bendung – Kemayungan di Kecamatan Ciruas;
 3. Jalan Jengkol – Kemayungan di Kecamatan Ciruas;
 4. Jalan Lebak Kepuh – Lebakwangi di Kecamatan Lebakwangi;
 5. Jalan Ciruas – Pontang di Kecamatan Pontang, Kecamatan Lebak Wangi dan Kecamatan Ciruas;
 6. Jalan Bojong Gadung – Carenang di Kecamatan Carenang;
 7. Jalan Desa Pamanuk – Mekarsari di Kecamatan Carenang;
 8. Jalan Sentul – Terasbendung – Tirtayasa di Kecamatan Kragilan, Kecamatan Lebak Wangi, Kecamatan Tirtayasa dan Kecamatan Pontang;
 9. Jalan Tambak – Malabar – Pamarayan di Kecamatan Kibin, Kecamatan Bandung, dan Kecamatan Pamarayan;
 10. Jalan Pamarayan – Kolelet di Kecamatan Pamarayan;
 11. Jalan Jambu – Catang di Kecamatan Tunjung Teja;
 12. Jalan Sentul – Kisarap di Kecamatan Kragilan dan Kecamatan Cikeusal;
 13. Terate – Banten Lama di Kecamatan Kramatwatu;
 14. Jalan Wadas – Lambangsari di Kecamatan Bojonegara;
 15. Jalan Raya Anyer (Cilegon) di Kecamatan Anyar;
 16. Jalan Gunungsari – Mancak – Anyar di Kecamatan Anyar;
 17. Jalan Anyar – Jaha di Kecamatan Anyar; dan
 18. Jalan lain yang menghubungkan dengan ruang-ruang evakuasi bencana banjir.
- d. Ruang evakuasi bencana banjir meliputi :
 1. Bangunan kantor pemerintahan setempat; dan
 2. Ruang terbuka publik.
- e. Jalur evakuasi bencana tsunami, meliputi :
 1. Jalan Umbul Tanjung di Kecamatan Cinangka;

2. Jalan Pasauran – Sadatani di Kecamatan Cinangka;
 3. Jalan Bulakan di Kecamatan Cinangka;
 4. Jalan Karangsuraga – Bantarwaru di Kecamatan Cinangka;
 5. Jalan desa Karangsuraga – Cinangka di Kecamatan Cinangka;
 6. Jalan desa Cinangka di Kecamatan Cinangka;
 7. Jalan desa Sindanglaya di Kecamatan Cinangka;
 8. Jalan desa Kamasan – Sindanglaya di Kecamatan Cinangka;
 9. Jalan desa Kamasan di Kecamatan Cinangka;
 10. Jalan desa Bandulu di Kecamatan Anyar;
 11. Jalan desa Cikoneng – Tanjung Manis di Kecamatan Anyar;
 12. Jalan desa Tambangayam di Kecamatan Anyar;
 13. Jalan desa Anyar – Tanjung Manis di Kecamatan Anyar;
 14. Jalan desa Mekarsari–Tanjung Manis di Kecamatan Anyar; dan
 15. Jalan desa Grogol Indah – Banjarsari di Kecamatan Anyar.
- f. Ruang evakuasi bencana tsunami meliputi:
1. Lapangan olah raga setempat;
 2. Bangunan pemerintah setempat;
 3. Titik kumpul;
 4. Ruang terbuka publik; dan
 5. Bangunan lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi, meliputi :
1. Ciomas – Mandalawangi di Kecamatan Ciomas;
 2. Palima – Pasangteneng di Kecamatan Padarincang;
 3. Pakupatan – Palima di Kecamatan Pabuaran; dan
 4. Jalan lain yang menghubungkan dengan ruang-ruang evakuasi bencana letusan gunung api.
- h. Ruang evakuasi bencana gunung berapi, meliputi :
1. Lapangan olah raga setempat;
 2. Bangunan pemerintah setempat;
 3. Ruang terbuka publik; dan

4. Bangunan lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pola ruang wilayah Kabupaten Serang terdiri dari :

- a. Kawasan peruntukan lindung, dengan luas lebih kurang 11.955 (sebelas ribu sembilan ratus lima puluh lima) hektar meliputi :
 - Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air);
 - Kawasan perlindungan setempat (Sempadan pantai, Sempadan sungai, Kawasan sekitar danau/waduk/situ, dan Ruang Terbuka Hijau);
 - Kawasan konservasi (Kawasan suaka alam, Kawasan pelestarian alam serta Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil);
 - Kawasan lindung geologi (merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah yaitu sempadan mata air yang berupa daratan di sekeliling mata air dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter pada air di luar kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter pada mata air di dalam kawasan permukiman untuk mempertahankan fungsi mata air);
 - Kawasan rawan bencana (Kawasan rawan bencana banjir, Kawasan rawan bencana tanah longsor, Kawasan rawan bencana letusan gunung api, Kawasan rawan bencana gempa bumi, dan Kawasan rawan bencana tsunami);
 - Kawasan cagar budaya terdiri dari Kawasan Cagar Budaya Provinsi Banten (berupa Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Carita seluas 748 (tujuh ratus empat puluh delapan) hektar di Kecamatan Cinangka dan Padarincang) dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Serang (Kawasan Wisata Religi Syekh Nawawi Al Bantani di Kecamatan Tanara, Kawasan Makam Sultan Ageng Tirtayasa di Kecamatan Tirtayasa, Kawasan Situs Pangindelan Abang dan Kawasan Ziarah Sumur Tujuhbelas di Kecamatan Kramatwatu, Kawasan Situs Batu Lingga di Kecamatan Baros, Kawasan Ziarah Makam Cikole dan Kawasan Bendung Pamarayan Lama di Kecamatan Pamarayan, Kawasan Situs Patapan di Kecamatan Kibin dan Kawasan Ziarah Gunung Santri di Kecamatan Bojonegara);

- Kawasan ekosistem mangrove, dengan luas kurang lebih 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) hektar meliputi Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Pontang, Kecamatan Tanara dan Kecamatan Tirtayasa.
- b. Kawasan peruntukan budi daya, seluas kurang lebih 134.323 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga) hektar terdiri atas :
 - Kawasan hutan produksi, dengan luas kurang lebih 5.684 (lima ribu enam ratus delapan puluh empat) hektar meliputi Kawasan hutan produksi terbatas (seluas kurang lebih 4.396 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam) hektar di Kecamatan Anyar, Kecamatan Cinangka, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Mancak, Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Padarincang) dan Kawasan hutan produksi tetap (seluas kurang lebih 1.288 (seribu dua ratus delapan puluh delapan) hektar di Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Kramatwatu, Kecamatan Padarincang, Kecamatan Pulo Ampel dan Kecamatan Waringinkurung.
 - Kawasan hutan rakyat dengan luas kurang lebih 5.540 (lima ribu lima ratus empat puluh) hektar, meliputi Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Cinangka, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Kramatwatu, Kecamatan Mancak, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Padarincang, Kecamatan Pulo Ampel dan Kecamatan Waringinkurung.
 - Kawasan pertanian, seluas kurang lebih 57.202 (lima puluh tujuh ribu dua ratus dua) hektar terdiri atas Kawasan tanaman pangan, Kawasan perkebunan dan Kawasan peternakan.
 - Kawasan perikanan, seluas kurang lebih 224 (dua ratus dua puluh empat) hektar terdiri atas Kawasan perikanan tangkap, Kawasan perikanan budi daya dan Sarana dan prasarana perikanan tangkap.
 - Kawasan pertambangan dan energi, meliputi Kawasan pertambangan mineral, Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dan Pertambangan panas bumi.
 - Kawasan peruntukan industri, seluas kurang lebih 26.309 (dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan) hektar, terdiri atas Kawasan industri dan Sentra industri kecil dan menengah.

- Kawasan pariwisata, dengan luas kurang lebih 3.279 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) hektar, terdiri atas Kawasan pariwisata alam dan Kawasan pariwisata budaya.
- Kawasan permukiman, seluas 36.084 (tiga puluh enam ribu delapan puluh empat) hektar terdiri atas Kawasan permukiman perkotaan dan Kawasan permukiman perdesaan.
- Kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi : Kantor Koramil di setiap wilayah kecamatan, Rahlat Paskhas Gorda di Kecamatan Binuang, Pos TNI AL di Pulau Sangiang Kecamatan Anyar, Pos TNI AL di Pulau Panjang Kecamatan Pulo Ampel dan Posmat Anyar, Kampung Paku Anyar Kecamatan Anyar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031, kawasan rawan bencana di wilayah Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

- 1) Kawasan rawan bencana banjir, berada di kawasan sekitar DAS Ciujung meliputi : Kecamatan Kragilan, Kecamatan Kibin, Kecamatan Bandung, Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Pamarayan, Kecamatan Tunjungteja, Kecamatan Pontang, Kecamatan Tirtayasa dan Kecamatan Tanara.
- 2) Kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi : Kecamatan Anyar, Kecamatan Mancak, Kecamatan Cinangka, Kecamatan Padarincang, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Kopo, Kecamatan Kramatwatu, Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Lebakwangi, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Pamarayan, Kecamatan Petir, Kecamatan Pontang dan Kecamatan Pulo Ampel.
- 3) Kawasan rawan bencana letusan gunung api meliputi Kecamatan Ciomas dan Kecamatan Padarincang.
- 4) Kawasan rawan bencana gempa bumi tersebar diseluruh wilayah Kabupaten.
- 5) Kawasan rawan bencana tsunami meliputi Kecamatan Pulo Ampel, Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Pontang, Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Tanara, Kecamatan Anyar dan Kecamatan Cinangka.

Sesuai Pasal 35 di Peraturan Daerah tersebut, Rehabilitasi Buffer Zone rawan bencana melalui RTH sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagai area evakuasi saat terjadi bencana, serta penetapan lokasi jalur evakuasi, shelter, Sistem Peringatan Dini Bencana dan

infrastruktur kebencanaan yang terintegrasi diarahkan tersebar di wilayah rawan bencana Kabupaten.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan peta bahaya dan peta risiko bencana Kabupaten Serang, kondisi masing-masing bencana tersebut adalah :

1. Gempa bumi

- a. Kecamatan dengan kategori bahaya tinggi terhadap bencana gempabumi antara lain Kecamatan Cinangka dengan area berzona bahaya tinggi seluas 11.221 ha, Kecamatan Padarincang 6.046 ha, Kecamatan Ciomas 2.812 ha, Kecamatan Mancak 324 ha dan Kecamatan Anyar seluas 845 ha.
- b. Kecamatan dengan kategori risiko tinggi terhadap bencana gempa bumi antara lain Kecamatan Cinangka (11.201 Ha), Kecamatan Padarincang (6.207 Ha), Kecamatan Ciomas (2.954 Ha), Kecamatan Petir (2.822 Ha) dan Kecamatan Kramatwatu (2.213 Ha).

2. Tsunami

- a. Kecamatan dengan kategori bahaya tinggi terhadap bencana tsunami antara lain Sepanjang pantai di Kecamatan Anyar (Pantai Anyer) dan Kecamatan Cinangka mempunyai tingkat bahaya tsunami yang tinggi. Ketinggian tsunami dari hasil simulasi ini mencapai 2,2 meter di Pantai Anyer dan 2,16 meter di wilayah Kecamatan Cinangka.
- b. Kecamatan dengan kategori risiko tinggi terhadap bencana tsunami antara lain Kecamatan Tirtayasa (167,08 ha), Kecamatan Bojonegoro (165,11 ha), Kecamatan Cinangka (161,91 ha), Kecamatan Pulo Ampel (127,79 ha) dan Kecamatan Tanara (106,83 ha).

3. Tanah Longsor

- a. Kecamatan dengan kategori bahaya tinggi terhadap bencana tanah longsor antara lain Kecamatan Mancak dengan luas 1.814 ha, Kecamatan Padarincang 1.369 ha, Kecamatan Anyar 1.302 ha, Kecamatan Bojonegara 863 ha dan Kecamatan Cinangka 845 ha
- b. Kecamatan dengan kategori risiko tinggi terhadap bencana tanah longsor antara lain Kecamatan Anyar (1.498 ha atau 21,6% dari luas kecamatan), Kecamatan Pulo Ampel (1,082 ha/ 25,8%), Kecamatan Bojonegara (1.019 ha/ 29,7%), Kecamatan Baros (828,5 ha/ 22%) dan Kecamatan Padarincang (561 ha/ 5,7%).

4. Abrasi Pantai

- a. Kecamatan dengan kategori bahaya tinggi terhadap bencana abrasi pantai meliputi Kecamatan Cinangka dan Kecamatan Anyar dengan panjang pantai $\pm 14,3$ km.
- b. Kecamatan dengan kategori risiko tinggi terhadap bencana abrasi pantai antara lain kecamatan-kecamatan Kecamatan Cinangka (20,03 km), Kecamatan Anyar (8,63 km), Kecamatan Pulo Ampel (2,43 km) dan Kecamatan Bojonegara (1,77 km).

5. Banjir

- a. Kecamatan dengan kategori bahaya tinggi terhadap bencana banjir antara lain Kecamatan Jawilan (4.043 ha), Kecamatan Cikande (3.943 ha), Kecamatan Pamarayan (3.017 ha), Kecamatan Kragilan (2.873 ha), Kecamatan Kopo (2.855 ha)
- b. Kecamatan dengan kategori risiko tinggi terhadap bencana banjir antara lain Kecamatan Padarincang (4.131,16 ha), Kecamatan Tirtayasa (2.580,16 ha), Kecamatan Tanara (2.437,21 ha), Kecamatan Carenang (2.034,47), Kecamatan Cikeusal (1.896,48).

6. Kekeringan

- a. Kecamatan dengan kategori bahaya tinggi terhadap bencana kekeringan antara lain Kecamatan Anyar (334 ha), Kecamatan Cinanga (184 ha), Waringinkurung (174 ha), Kramatwatu (139 ha), Tanara (137 ha).
- b. Kecamatan dengan kategori risiko tinggi terhadap bencana kekeringan antara lain Kecamatan Kramatwatu (110.56 ha), Kecamatan Waringinkurung (76.39 ha), Kecamatan Ciomas (20.52 ha), Kecamatan Padarincang (9.60 ha) dan Kecamatan Bojonegara (4.24 ha).

7. Puting Beliung

- a. Kecamatan dengan kategori bahaya tinggi terhadap bencana puting beliung antara lain Kecamatan Cinangka (12178 ha), Kecamatan Mancak (9643 ha), Kecamatan Tanara (4804 ha), Kecamatan Kopo (3791 ha).
- b. Kecamatan dengan kategori risiko tinggi terhadap bencana puting beliung antara lain Kecamatan Kopo (919.37 ha), Kecamatan Tanara (285.34 ha) dan Kecamatan Mancak (139.51 ha).

8. Kebakaran Hutan dan Lahan

- a. Kecamatan dengan kategori bahaya tinggi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan antara lain Kecamatan Pulo Ampel (869,82 hektar atau sekitar 20,07% wilayah

kecamatan tersebut) dan Kecamatan Bojonegara (583,12 hektar atau sekitar 16,5% wilayah kecamatan tersebut).

- b. Kecamatan dengan kategori risiko tinggi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan antara lain Kecamatan Bojonegara (165,28 ha), Kecamatan Pulo Ampel (107,83 ha), Kecamatan Lebak Wangi (39,59 ha), Kecamatan Kramatwatu (38,20 ha) dan Kecamatan Tanara (1,13 ha).

9. Konflik Sosial

- a. Kecamatan dengan kategori bahaya tinggi terhadap bencana konflik sosial antara lain Kecamatan Cikande, Kecamatan Kibin, Kecamatan Kragilan, Kecamatan Pulo Ampel, Kecamatan Pamarayan, dan Kecamatan Kramatwatu.
- b. Kecamatan dengan kategori risiko tinggi terhadap bencana konflik sosial antara lain Kecamatan Pulo Ampel (931.66 ha), Kecamatan Bojonegara (691.47 ha), Kecamatan Kragilan (776.80 ha), Kecamatan Cikande (346.03 ha), Kecamatan Kibin (222.48 ha), Jawilan (215.35 ha), Kecamatan Kramatwatu (643.57 ha), dan Kecamatan Pamarayan (902.83 ha).

10. Gagal Teknologi Industri

- a. Kecamatan dengan kategori bahaya tinggi terhadap bencana gagal teknologi di Kabupaten Serang berada di Kecamatan Pulo Ampel.
- b. Kecamatan dengan kategori risiko tinggi terhadap bencana gagal teknologi di Kabupaten Serang berada di Kecamatan Pulo Ampel, Kecamatan Kibin, dan Kecamatan Cikande.

11. Kebakaran Pemukiman

- a. Kecamatan dengan kategori bahaya tinggi terhadap bencana kebakaran pemukiman antara lain Kecamatan Cikeusal (591,12 ha), Kecamatan Petir (523,01 ha), Kecamatan Mancak (315 ha), Kecamatan Kopo (298,43 ha) dan Kecamatan (284,92 ha).
- b. Kecamatan dengan kategori risiko tinggi terhadap bencana kebakaran pemukiman antara lain Kecamatan Cikande (561 ha), Kecamatan Ciruas (475 ha), Kecamatan Anyar (425 ha), Kecamatan Parmarayan (382 Ha) dan Kecamatan Kibin (301 ha).

Master plan bencana gagal teknologi industri secara rinci dilakukan pada Zona Industri Pulo Ampel-Bojonegara. Industri yang mempunyai bahaya gagal teknologi industri antara lain adalah: PT. Polychem Indonesia, PT. Styrimo Mono Indonesia (SMI), PT. BASF, PT. Sulfindo

Adiusaha. Bahan berbahaya yang digunakan dan diproduksi oleh industri tersebut antara lain adalah : Gas Chlorine, Ethylene, Butadiene, VCM, EDC, Styrene, dan sebagainya.

Dari 163 indikator tujuan pembangunan berkelanjutan, terdapat tujuh indikator yang harus dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019.
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 .
3. Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019.
4. Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019.
5. Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.
6. Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.
7. Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.

Indikator-indikator tersebut berkaitan dengan daya dukung daya tampung lingkungan hidup utamanya terkait dengan jasa lingkungan pengaturan iklim dan pengaturan tata aliran air dan banjir. Indikator meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 diwujudkan dengan adanya program Kelompok Masyarakat Siaga Bencana (KMSB) antara lain di KMSB Warga Peduli Banjir di Desa Kalumpang, Kampungbaru, Binong, Sukamaju, Pegandikan, Siremen, Laben, dan Puser; KMSB Warge Peduli Banjir dan Longsor di Desa Keboncau, Malabar, Tegal Maja, dan Bolang; KMSB Desa Pudar; KMSB Desa Wirana; KMSB Desa Damping; KMSB Desa Sangiang; KMSB Desa Pamarayan; KMSB Desa Blokang; KMSB Standar di Desa Cijeruk; KMSB Tambak Peduli di Desa Tambak; KMSB Pratama di Desa Penyebrangan; KMSB Patriot di Desa Katulisan; KMSB Surya di Desa Panosongan; KMSB Ciujung Gandayasa di Desa Gandayasa; KMSB Bangkit Bersama di Desa Kragilan; KMSB Putra Binuang di Desa Binuang; KMSB Cakung Siaga di Desa Cakung; dan KMSB Cidurian Siaga di Desa Renged.

Selain KMSB, penguatan risiko bencana juga dilakukan dengan membentuk 36 Desa Tangguh Bencana (Destana) yaitu:

- A. Kecamatan Anyer : Desa Sindang Karya
- B. Kecamatan Bojonegara : Desa Margagiri
- C. Kecamatan Tanara : Desa Tanara
- D. Kecamatan Pulo Ampel : Desa Argawana

- E. Kecamatan Padarincang : Desa Citasuk dan Batukuwung
- F. Kecamatan Bandung : Desa Blokang, Malabar, Priwulung, dan Bandung
- G. Kecamatan Pamarayan : Desa Kampung Baru, Wirana, Sangiang, Pamarayan
- H. Kecamatan Cikeusal : Desa Katulisan, Panyabrangan, Panosongan, Gandayasa
- I. Kecamatan Tirtayasa : Desa Susukan, Laban, Lontar, Tirtayasa, Alang-Alang dan Tengkurak
- J. Kecamatan Pontang : Desa Wanayasa, Singarajan, Kaserangan, dan Kelapian
- K. Kecamatan Tanara : Desa Siremen, Cibodas, Cerukcuk, Sukamanah, Lempuyang, Tenjo Ayu, Pedalaman, dan Bendung.

Untuk mencapai indikator tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan, Kabupaten Serang memiliki tiga alat peringatan dini yaitu InaTews IntensityPendeteksi Getaran/Gempa yang berfungsi untuk mendeteksi getaran/gempa yang terjadi dan langsung terkirim secara otomatis ke BMKG; Server Early Warning System yang berfungsi untuk dapat mengirimkan pesan secara otomatis jika terjadi gempa di wilayah Indonesia di atas 5 Skala Richter; dan Alat Komunikasi radio yang dapat digunakan untuk berkomunikasi menggunakan frekuensi untuk mengetahui kebencanaan di berbagai wilayah. Untuk lima indikator lainnya belum memiliki data.

3.5 Penentuan Isu-Isu strategis

Penentuan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Identifikasi isu-isu strategis yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan arah prioritas pembangunan daerah yang menjadi tujuan dan sasaran yang dapat dioperasionalkan serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, isu-isu strategis juga merupakan salah satu sumber masukan dalam melakukan analisis lingkungan eksternal dan internal terhadap proses perencanaan. Jika analisis lingkungan eksternal dan internal diidentifikasi dengan baik dan tepat, maka pemerintahan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan akan dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah yang tidak menyesuaikan atau memperhatikan isu strategisnya kemungkinan akan menghadapi hambatan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau tidak berhasil dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Secara teknis Isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam dalam berbagai bidang pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat memberi warna serta mempengaruhi pelaksanaan agenda pembangunan

dalam lima tahun ke depan, baik dalam lingkup regional, nasional dan global.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Sebagaimana tersebut dalam dokumen RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026, isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kabupaten Serang tahun 2021-2026 sesuai dengan nilai urutan pembobotannya adalah sebagai berikut :

TABEL 3.5

IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026 KABUPATEN SERANG

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Jumlah	Rata2 Skor
		1	2	3	4	5	6		
1	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat	20	10	20	10	15	25	100	17
2	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat	20	10	20	10	15	25	100	17
3	Pengembangan infrastruktur dasar daerah	20	10	20	10	15	25	100	17
4	Percepatan penanggulangan kemiskinan	20	10	20	10	10	25	95	16
5	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	20	10	20	7	10	25	92	15
6	Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya ekonomi lokal	20	10	20	10	5	25	90	15
7	Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	20	10	15	10	10	20	85	14
8	Pemerataan pembangunan antar wilayah (kecamatan)	20	10	15	10	5	10	70	12
9	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	20	4	10	4	5	15	58	10
10	Peningkatan kemampuan fiskal daerah untuk pendanaan pembangunan	10	10	10	10	5	10	55	9
11	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan	10	7	10	4	5	15	51	9

Dengan demikian, pembangunan Kabupaten Serang dalam lima tahun ke depan hendaknya harus memperhatikan isu-isu tersebut di atas agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya serta mewujudkan peran dan fungsi daerah baik dalam hirarkinya di lingkup regional dan nasional, maupun lingkup internal Kabupaten Serang sendiri.

Sesuai urusan pemerintahan Trantibumlinmas yang dipegang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, isu strategis yang menjadi prioritas adalah **Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.**

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Sesuai Rancangan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang mendukung **Misi ke 5 Kabupaten Serang yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan profesional.**

Tujuan dari Misi ke 5 adalah **Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan indikator Indeks reformasi Birokrasi.** Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan misi ke 5 tersebut sesuai rancangan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator :
 - Nilai LPPD
 - Tingkat Layanan dan fasilitasi Fungsi DPRD
 - Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan
 - Cakupan penyelenggaraan urusan dan pembinaan kewilayahan yang ditangani
2. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator:
 - Tingkat Maturitas SPIP
 - Persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti di Wilayah Kerja IRBAN
3. Meningkatnya Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator :
 - Opini BPK
 - Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah

4. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi, dengan indikator :
 - Prosentase kesesuaian Dokumen Perencanaan OPD dengan Dokumen Perencanaan Pemerintah daerah
 - Prosentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan OPD sesuai dengan Perencanaan
 - Indek/Katagori Inovasi Daerah
 - Cakupan data statistic sektoral yang dipublikasikan
5. Meningkatnya kualitas SDM aparatur, dengan indikator :
 - Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori sangat baik
 - Cakupan standar kompetensi pegawai
6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik yang didukung kemajuan TI, dengan indikator :
 - Cakupan pelayanan Smart City
 - Cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan pencatatan sipil
 - Prosentasi kerjasama dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan lintas sektoral melalui aplikasi berbasis SIAK
 - Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku
 - Persentase masyarakat yang melakukan kunjungan ke perpustakaan
 - Cakupan penyelesaian masalah pertanahan
 - Tingkat keamanan informasi persandian daerah
7. Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan ketertiban umum dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, dengan indikator :
 - Rasio Penduduk Terkena Tindak Pelanggaran trantibum, Perda dan Perkada per 100.000 penduduk
 - Indeks Risiko Bencana (IRB)

Sesuai urusan pemerintahannya, sasaran pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang ada di sasaran ke 7 yaitu **meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga keamanan ketertiban umum dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana**, dengan indikator sasaran :

- a. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Untuk mendukung sasaran urusan pemerintahan tersebut maka didukung dengan tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala OPD seperti yang tercantum dalam tabel 4.1. dan 4.2.

Tabel 4.1.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB	BB
		Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan ketertiban umum dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Score 203,10	Score 203,05	Score 203	Score 202,80	Score 202,50	Score 200

TABEL 4.2.
PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PELAYANAN
BPBD KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 – 2026

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	RUMUS/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan penunjang dan administrasi pelayanan perangkat daerah				%	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan tata kelola organisasi perangkat daerah	1. Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah	Prosentase penyampaian dokumen dan laporan sesuai jadwal yang telah ditentukan pada tahun berkenaan	%	100	100	100	100	100	100	
	2. Tingkat pelayanan administrasi keuangan dan penatausahaan	Prosentase nota dinas yang disampaikan dan ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	
	3. Tingkat pemenuhan kebutuhan terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	Prosentase kegiatan yang dilaksanakan pada DPA PD terkait pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100	
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
Output : Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja BPBD Kab. Serang				%	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program,	Jumlah dokumen Renstra dan Renja BPBD Kab. Serang	Ketersediaan dokumen Renstra dan Renja pada tahun berkenaan sesuai kalender perencanaan (5 tahunan dan tahunan)	dokumen	2	1	1	1	1	2	

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	RUMUS/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
kegiatan dan anggaran perangkat daerah		Jumlah dokumen RKAP, DPPA, dan RKAS BPBD Kab. Serang	Ketersediaan dokumen RKAP, DPPA, RKAS BPBD Kab. Serang	dokumen	3	3	3	3	3	3
		Jumlah dokumen Renja dan Renstra serta pelaksanaan Forum Renja dan Renstra Perangkat Daerah BPBD Kab. Serang	Terlaksananya penyusunan dokumen Renja dan Renstra serta penyelenggaraan Forum Renja dan Renstra Perangkat Daerah BPBD Kab. Serang	dokumen	2	1	1	1	1	2
		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LAKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Kinerja Lainnya)	Ketersediaan dokumen laporan capaian kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan daerah akhir tahun n-1	dokumen	4	4	4	4	4	4
		Jumlah Input Data Aplikasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya penginputan data aplikasi pelaporan kinerja perangkat daerah	aplikasi	4	4	4	4	4	4
		Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertriwulanan	Ketersediaan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan	laporan	2	2	2	2	2	2
		Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tersedia	Ketersediaan dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	dokumen	-	-	1	1	1	1
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
Output : Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah				%	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyusunan laporan keuangan dan penatausahaan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan tahunan dan semesteran perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan tahunan dan semesteran perangkat daerah tahun n-1	laporan	1	1	1	1	1	1

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	RUMUS/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
Output : Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah				%	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya pengelolaan kebutuhan sarpras penunjang administrasi kepegawaian, peningkatan disiplin dan peningkatan kapasitas SDM pegawai perangkat daerah	Tertata dan terkelolanya kebutuhan sarpras penunjang administrasi kepegawaian, peningkatan disiplin dan peningkatan kapasitas SDM pegawai perangkat daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarpras penunjang administrasi kepegawaian, peningkatan disiplin dan peningkatan kapasitas SDM pegawai perangkat daerah	tahun	1	1	1	1	1	1
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah										
Output : Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah				%	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya pengelolaan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Tertata dan terkelolanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	tahun	1	1	1	1	1	1
		Terfasilitasinya penyelenggaraan tugas ASN	Terfasilitasinya penyelenggaraan tugas ASN	bulan	12	12	12	12	12	12
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan lainnya penunjang urusan pemerintahan daerah				%	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kelancaran tugas pegawai	Tersedianya sarana pendukung pekerjaan kantor	Terpenuhinya sarana pendukung pekerjaan kantor	tahun	1	1	1	1	1	1
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Output : Terbayarnya jasa pelayanan umum dan pelaksanaan tugas aparatur				%	100	100	100	100	100	100

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	RUMUS/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya kinerja pelayanan umum kantor	Terlaksananya pelayanan umum perkantoran	Terpenuhinya jasa pelayanan umum dan kebutuhan rumah tangga kantor	bulan	12	12	12	12	12	12
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Output : Terpelihara dan terawatnya barang milik daerah				%	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya nilai manfaat barang milik daerah pada perangkat daerah	Kondisi barang milik daerah pada perangkat daerah dapat berfungsi dengan baik	Barang milik daerah yang ada pada perangkat daerah dapat digunakan dan berfungsi dengan baik	bulan	12	12	12	12	12	12
II. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA										
Outcome : Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan bencana serta penanganan pasca bencana			(Akumulasi indikator kinerja program Penanggulangan Bencana/4) X 100%	%	100	100	100	100	100	100
	Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	(Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana / Jumlah seluruh penduduk di kawasan rawan bencana) X 100%	%	100	100	100	100	100	100
		Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	(Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana/ Jumlah seluruh penduduk) X 100%	%	100	100	100	100	100	100
	Sasaran : Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga keamanan ketertiban umum dan	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	(Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana / Jumlah seluruh korban bencana di Kabupaten Serang) X 100%	%	100	100	100	100	100	100

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	RUMUS/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Persentase penanganan pasca bencana	(Jumlah unit bangunan (pemukiman, jalan, jembatan, infrastruktur) yang terpulihkan pasca bencana /Jumlah unit bangunan (pemukiman, jalan, jembatan, infrastruktur) yang harus dipulihkan) X 100%	%	100	100	100	100	100	100
1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota										
	Output : Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		(Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana / Jumlah seluruh penduduk di kawasan rawan bencana) X 100%	%	100	100	100	100	100	100
	Meningkatkan wawasan aparatur dan masyarakat terkait bencana dan meningkatkan koordinasi penanggulangan bencana antar pelaku bencana dan stakeholder terkait	1. Terlaksananya penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana	Ketersediaan Dokumen Kajian Resiko Bencana	dokumen	1	1	1	1	1	1
		2. Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab. Serang per jenis bencana	Jumlah kegiatan sosialisasi KIE rawan bencana Kab. Serang yang terselenggara	kegiatan	1	1	1	1	1	1
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana										
	Output : Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		(Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana/ Jumlah seluruh penduduk) X 100%	%	100	100	100	100	100	100

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	RUMUS/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Output : Persentase penanganan pasca bencana	(Jumlah unit bangunan (pemukiman, jalan, jembatan, infrastruktur) yang terpulihkan pasca bencana /Jumlah unit bangunan (pemukiman, jalan, jembatan, infrastruktur) yang harus dipulihkan) X 100%	%	100	100	100	100	100	100
	Meningkatkan wawasan aparatur dan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta meningkatkan penanganan pasca bencana	1. Terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Serang	Jumlah dokumen RPB dan Rencana Kontinjensi Kabupaten Serang yang tersusun	dokumen	1	1	1	1	1	1
		2. Terlaksananya pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	orang	50	50	50	50	50	50
		3. Terlaksananya Dalops dan penyediaan sarpras kesiapsiagaan terhadap bencana	Ketersediaan Dalops dan sarpras kesiapsiagaan terhadap bencana	Tahun	1	1	1	1	1	1
		4. Tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang tersedia	paket	1	1	1	1	1	1
		5. Terlaksananya penanganan pasca bencana di wilayah Kab. Serang	Jumlah tim jitupasna yang terbentuk	tim	1	1	1	1	1	1
			Jumlah kegiatan bimtek pelatihan tim jitupasna yang terselenggara	kegiatan	1	1	1	1	1	1
			Jumlah kegiatan Rakor penanganan pasca bencana yang terselenggara	kegiatan	1	1	1	1	1	1

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	RUMUS/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Jumlah pembangunan kembali unit bangunan yang terkena dampak bencana	paket	-	5 lokasi, 50 Rumah	7 lokasi, 60 Rumah	7 lokasi, 65 rumah	8 lokasi, 70 rumah	10 lokasi, 75 rumah
		6. Terlaksananya Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas anggota TRC bencana kabupaten/kota	Kegiatan	12	12	12	12	12	12
		7. Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) bencana	Kegiatan	3	3	3	3	3	3
		8. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah pelaksanaan kegiatan apel/gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	kegiatan	1	1	1	1	1	1
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										
		Output : Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	(Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana / Jumlah seluruh korban bencana di Kabupaten Serang) X 100%	%	100	100	100	100	100	100
		1. Terlaksananya Respon Cepat Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan tanggap darurat bencana di wilayah Kabupaten Serang	bulan	12	12	12	12	12	12
		2. Terlaksananya penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah logistik korban bencana yang tersedia	Paket/tahun	1	1	1	1	1	1
		3. Terlaksananya Aktivasi sistem komando darurat bencana	Jumlah penyelenggaraan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	kegiatan	2	2	2	2	2	2

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	RUMUS/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana										
Output : Tingkat ketersediaan sistem dasar penanggulangan bencana				%	100	100	100	100	100	100
Menata sistem dasar penanggulangan bencana agar sesuai dengan peraturan yang berlaku	1. Tersusunnya dokumen regulasi (Perda/Perbup) tentang penanggulangan bencana	Jumlah dokumen regulasi (Perda/Perbup) tentang Penanggulangan Bencana	dokumen	1	1	1	1	1	1	1
	2. Terlaksananya penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota	Jumlah Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang terbentuk	Desa	10	10	10	10	10	10	10
	3. Terselenggaranya dan terfasilitasinya program Flood management on selected River Basin (FMSRB) di Kabupaten Serang	Jumlah pelaksanaan kegiatan Program Flood Management On Selected River Basin (FMSRB) di Kabupaten Serang	kegiatan	7	5	-	-	-	-	-
	4. Terselenggaranya Website Penanggulangan Bencana Kab. Serang Sebagai media Informasi, Sosialisasi dan Edukasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Website dan aplikasi Penanggulangan Bencana Kab. Serang Sebagai media Informasi, Sosialisasi dan Edukasi Penanggulangan Bencana	Website/apli kasi	1	1	1	1	1	1	1
	5. Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Jumlah pembayaran jasa piket, tunjangan dan honor anggota HUMAS	bulan	12	12	12	12	121	12	12
	6. Terselenggaranya Monev Penilaian DESTANA yang telah terbentuk dan Temu DESTANA	Jumlah penyelenggaraan Monev Penilaian DESTANA yang telah terbentuk dan Temu DESTANA	kegiatan	2	2	2	2	2	2	2
	7. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Terbayarnya honor dan makmin pengawas dan Pembina penanggulangan bencana	bulan	12	12	12	12	12	12	12

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	RUMUS/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
III. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN										
Outcome : Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran			Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran / Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran X 100%	%	100	100	100	100	100	100
Menurunkan ancaman resiko kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran		Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran / Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota										
Output : Tingkat pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				%	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		Jumlah bulan pembayaran honor piket, pengamanan dan makmin kesamaptaan anggota damkar non PNS	bulan	12	12	12	12	12	12
	2. Terlaksananya penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran		Jumlah bulan pembayaran honor piket, pengamanan dan makmin kesamaptaan anggota Rescue damkar non PNS	bulan	12	12	12	12	12	12

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	RUMUS/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
		3. Terlaksananya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	liter	1500	1500	3000	3000	3000	3000
		4. Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Ketersediaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	paket	30	30	30	30	30	30
		5. Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah peserta pembinaan yang mendapatkan pelatihan	orang	58	58	58	58	58	58
		6. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Ketersediaan dokumen Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	dokumen	12	12	12	12	12	12
2. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran										
Output : Tingkat inspeksi peralatan proteksi kebakaran				%	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan inspeksi terhadap peralatan proteksi kebakaran	1. Terlaksananya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah perusahaan yang terdata dalam sarana dan prasarana proteksi kebakaran	perusahaan	700	720	730	735	740	750	

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	RUMUS/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
		2. Terlaksananya Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	persentase realisasi / target retribusi alat pemadam kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran										
Output : Tingkat pemberdayaan kesiapsiagaan masyarakat dalam pencegahan kejadian kebakaran				%	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam pencegahan kejadian kebakaran	1. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	kegiatan	3	3	3	3	3	3	3
4. Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan manusia										
Output : Tingkat pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia				%	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan kualitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	1. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	kegiatan	60	60	62	64	66	68	
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/penyelematan dan evakuasi	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/penyelematan dan evakuasi	unit	43	43	43	43	43	43	43

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	RUMUS/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
		3. Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah peserta pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi yang mendapatkan pelatihan	orang	42	42	42	42	42	42

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan.

Sesuai RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, Strategi dan Arah Kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang dipegang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera Berkeadilan dan Agamis			
Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan ketertiban umum dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan keamanan, ketertiban umum, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	1. Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan
			2. Monitoring bersama masyarakat secara berkala
			3. Peningkatan kesepahaman mengenai pengurangan resiko bencana ada di semua elemen (urusan)
			4. Kerjasama pengembangan Desa Tangguh Bencana

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah juga menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Melalui program pembangunan daerah inilah dapat dilihat seperti apa nantinya visi dan misi daerah akan dijabarkan dalam program beserta pendanaannya secara berkelanjutan di tiap tahunnya.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan / strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan dan memperhatikan serta mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang dalam kurun waktu 2021-2026, serta memperhatikan pula visi, misi, tujuan, sasaran, strategi / kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026, maka disusunlah rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif per kegiatan, secara lengkap sebagaimana diurai dalam tabel 6.1. berikut :

TABEL 6.1.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)		Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintah daerah	%	100	100	9.828.120.497	100	9.754.844.027	100	10.058.677.183	100	10.453.677.191	100	10.853.677.195	100	11.103.677.199	600	62.052.673.292	SEKRETARIAT	BPBD KAB. SERANG
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Laporan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja BPBD Kab. Serang	Tahun	1	1	66.500.000	1	104.622.145	1	145.000.000	1	335.000.000	1	335.000.000	1	435.000.000	6	1.421.122.145		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan 5 tahunan BPBD Kab. Serang	Dokumen	4	5	47.925.000	4	57.110.000	4	65.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	5	350.000.000	26	1.020.035.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselenggaranya input data Aplikasi dan penyusunan Laporan Kinerja OPD (LAKIP, LKPI, LPPD, dan Laporan Kinerja Lainnya)	Tahun	1	1	18.575.000	1	47.512.145	1	45.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	6	261.087.145		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyusunan data/laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen						1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	4	140.000.000		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tahun	1	1	7.917.810.504	1	7.168.197.401	1	7.371.923.690	1	7.471.923.690	1	7.793.923.690	1	7.915.923.690	6	45.639.702.665		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di BPBD Kabupaten Serang	Tahun	1	1	7.917.810.504	1	7.168.197.401	1	7.353.923.690	1	7.449.923.690	1	7.767.923.690	1	7.885.923.690	6	45.543.702.665		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terselenggaranya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen						1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.500.000	4	15.000.000		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen						1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	4	13.000.000		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen						1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	4	11.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen						1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.500.000	4	15.000.000		
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terselenggaranya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen						1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	4	9.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen						4	2.000.000	4	2.500.000	4	3.000.000	4	3.500.000	16	11.000.000		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terselenggaranya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen						1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	4	9.000.000		
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penilaian penyusutan Barang Milik Daerah SKPD	Tahun						1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	4	13.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)		Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tahun	1	1	153.360.000	1	166.666.104	1	376.666.104	1	403.666.104	1	428.666.104	1	453.666.104	6	1.982.690.520		
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana utk peningkatan disiplin Pegawai	Tahun					1	10.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	4	46.000.000			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan beserta perlengkapan dan atributnya	Set					300	100.000.000	300	125.000.000	300	150.000.000	300	175.000.000	1200	550.000.000			
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pembayaran honorarium bulanan pramubakti	Bulan	12	12	153.360.000	12	166.666.104	12	166.666.104	12	166.666.104	12	166.666.104	12	166.666.104	72	986.690.520		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai/ASN Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	Orang					50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	200	200.000.000			
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan					1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	100.000.000			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan untuk poegawai/ASN	Orang					50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	200	100.000.000			
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun	1	1	409.446.575	1	580.331.335	1	636.041.435	1	663.041.435	1	665.041.435	1	667.041.435	6	3.620.943.650		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik Dan Penerangan di lingkungan BPBD Kab. Serang	Bulan	12	12	5.441.100	12	11.613.235	12	11.613.235	12	11.613.235	12	11.613.235	12	11.613.235	72	63.507.275		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya pengadaan Peralatan Kantor, Perlengkapan Gedung Kantor, serta Alat/Bahan untuk Kebersihan Kantor	Tahun	1	1	39.615.375	1	62.992.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	6	422.607.375		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tahun					1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor BPBD Kab. Serang	Bulan	12	12	53.606.500	12	115.217.900	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	72	648.824.400		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan jasa fotocopy, cetak spanduk dan barang cetakan	Bulan	12	12	38.416.600	12	57.680.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	72	336.096.600		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan				10.000.000	12	10.000.000	12	12.000.000	12	14.000.000	12	16.000.000	48	62.000.000			
			Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material bahan bangunan untuk pemeliharaan gedung kantor	Tahun					1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	60.000.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)		Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya penyediaan makmin tamu dan makmin pelaksanaan tugas kedinasan kantor BPBD Kab. Serang	Bulan	12	12	58.424.000	12	84.428.200	12	84.428.200	12	84.428.200	12	84.428.200	72	480.565.000				
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya penyediaan makmin rapat dan Terlaksananya Perjalanan dinas Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	213.943.000	12	238.400.000	12	250.000.000	12	275.000.000	12	275.000.000	72	1.527.343.000				
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tahun					1	306.000.000	1	326.000.000	1	376.000.000	4	1.484.000.000					
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit					3	280.000.000	3	300.000.000	3	350.000.000	12	1.380.000.000					
			Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Tahun					1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000					
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tahun					1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000					
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tahun					1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000					
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tahun					1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	4	24.000.000					
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan BPBD Kab. Serang	Tahun	1	1	696.820.000	1	772.034.140	1	548.053.052	1	599.053.052	1	650.053.052	6	3.917.066.348				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pembayaran honor bulanan Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	Bulan	12	12	86.400.000	12	93.053.052	12	93.053.052	12	93.053.052	12	93.053.052	72	551.665.260				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran jasa listrik, telepon dan internet serta publikasi program pembangunan prioritas daerah melalui media cetak, elektronik dan media online	Bulan	12	12	411.832.000	12	372.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	72	1.783.832.000				
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun					1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	4	26.000.000					
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya dukungan pelaksanaan penyelenggaraan HUT Daerah, HUT Damkar, AKCF, MTQ Kab. Serang, HUT RI, serta pembayaran honor petugas kebersihan	Tahun	1	1	198.588.000	1	306.981.088	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	6	1.555.569.088				
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan BPBD Kab. Serang	Tahun		1	584.183.400	1	982.702.584	1	990.702.584	1	990.702.584	1	990.702.584	6	5.529.696.320				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan serta pembayaran honor bulanan jasa driver Eselon II	Bulan	12	12	40.451.100	12	251.143.784	12	251.143.784	12	251.143.784	12	251.143.784	72	1.296.170.020				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 2, roda 4 dan roda 6	Bulan	12	12	511.519.800	12	571.672.800	12	571.672.800	12	571.672.800	12	571.672.800	72	3.369.883.800				
			Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Tahun					1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	4	12.000.000					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)		Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tahun	1	1	13.762.500	1	12.086.000	1	12.086.000	1	12.086.000	1	12.086.000	1	12.086.000	6	74.192.500		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tahun				1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	5	650.000.000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tahun						1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tahun	1	1	18.450.000	1	17.800.000	1	17.800.000	1	17.800.000	1	17.800.000	1	17.800.000	6	107.450.000		
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan ketertiban umum dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan bencana serta penanganan pasca bencana	%		100	2.532.880.000	100	3.224.027.253	100	3.110.194.097	100	3.115.194.101	100	3.115.194.103	100	3.115.194.105	600	18.212.683.659	BIDANG PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN,	KABUPATEN SERANG
			Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%						100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	400	200.000.000	BIDANG PENANGANAN DARURAT DAN BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan dokumen kajian risiko bencana	Dokumen						1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	100.000.000		
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kegiatan					1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	100.000.000			
			Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%		100		100	405.509.167	100	530.000.011	100	535.000.015	100	535.000.017	100	535.000.019	500	2.540.509.229		
				Persentase penanganan pasca bencana	%		100		100		100		100		100		100		500			
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Serang	Dokumen						1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000		
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang		50	32.400.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	250	232.400.000		
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Dalops dan Penyediaan sarpras kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tahun		1	39.600.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	3	214.600.000		
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Unit						1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	100.000.000		
			Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya survey lokasi pasca bencana dan penanganan pasca bencana (Bimtek/pelatihan jupasna, rakor pasca bencana, bimtek penanganan pengungsi)	Tahun		1	333.509.156	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	1.533.509.156		
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas anggota TRC bencana kabupaten/kota	kegiatan						12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	48	80.000.000		

Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)		Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) bencana	kegiatan				3	25.000.000			3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	12	100.000.000				
			Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah pelaksanaan kegiatan apel/gladi Kesiapsiagaan terhadap	kegiatan				1	20.000.000			1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4	80.000.000				
			Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%			100	1.957.880.000	100	2.211.184.086	100	2.213.184.086	100	2.213.184.086	100	2.213.184.086	100	2.213.184.086	600	13.021.800.430			
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan tanggap darurat bencana di wilayah Kabupaten Serang	Bulan		12	1.716.100.000	12	1.786.782.100	12	1.786.782.100	12	1.786.782.100	12	1.786.782.100	12	1.786.782.100	72	10.650.010.500				
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah logistik korban bencana yang tersedia serta pembayaran honor bulanan dan honor piket petugas	Bulan		12	241.780.000	12	424.401.986	12	424.401.986	12	424.401.986	12	424.401.986	12	424.401.986	72	2.363.789.930				
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah aktivasi sistem komando penanganan darurat	Kegiatan		-	-	2	2.000.000			2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	8	8.000.000				
			Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tingkat ketersediaan sistem dasar penanggulangan bencana	%			100	575.000.000	100	607.334.000	100	317.010.000	100	317.010.000	100	317.010.000	100	317.010.000	600	2.450.374.000			
			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi (Perda/Perbup) tentang Penanggulangan Bencana	Dokumen				1	50.000.000			1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000				
			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang terbentuk	Desa				10	25.000.000			10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	40	100.000.000				
			Kerjasama antar Lembaga dan Komunitas dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan Program Flood Management On Selected River Basin (FMSRB) di Kabupaten Serang	Kegiatan	8	7	575.000.000	5	375.324.000	5	-							17	950.324.000				
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Terlaksananya pembayaran honor bulanan dan jasa piket petugas humas serta pemanfaatan dan pengelolaan website dan aplikasi kebencanaan	Bulan			12	232.010.000	12	232.010.000	12	232.010.000	12	232.010.000	12	232.010.000	12	232.010.000	60	1.160.050.000			
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya Monev Penilaian DESTANA yang telah terbentuk dan Temu DESTANA	Kegiatan				2	10.000.000			2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000				
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	%			100	1.731.810.009	100	2.799.249.243	100	3.009.249.243	100	3.009.249.247	100	3.009.249.249	100	3.009.249.251	600	16.568.056.242	BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	KABUPATEN SERANG	
			Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	%			100	1.731.810.009	100	2.799.249.243	100	2.869.249.243	100	2.869.249.247	100	2.869.249.249	100	2.869.249.251	600	16.008.056.242			
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembayaran Honor dan jasa piket Anggota Damkar Non PNS, honor pengamanan, makmin kesamaptaian dan operasional kebakaran	bulan		12	1.463.350.000	12	1.771.976.180	12	1.771.976.180	12	1.771.976.180	12	1.771.976.180	12	1.771.976.180	12	1.771.976.180	72	10.323.230.900		
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Terlaksananya Pembayaran Honor dan jasa piket Anggota Non PNS	bulan		12	268.460.000	12	1.027.273.052	12	1.027.273.052	12	1.027.273.052	12	1.027.273.052	12	1.027.273.052	72	5.404.825.260				
			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tahun				1	10.000.000			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)		Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Paket						1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000		
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	orang						58	5.000.000	58	5.000.000	58	5.000.000	58	5.000.000	232	20.000.000		
			Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tahun						1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000		
			Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Tingkat inspeksi peralatan proteksi kebakaran	%						100	346.265.260	100	351.265.260	100	351.265.260	100	351.265.260	500	1.751.326.300		
			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran di wilayah Kabupaten Serang	Bulan						12	346.265.260	12	346.265.260	12	346.265.260	12	346.265.260	60	1.731.326.300		
			Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	%	105					100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	400	20.000.000		
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tingkat pemberdayaan kesiapsiagaan masyarakat dalam pencegahan kejadian kebakaran	%						100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	400	80.000.000		
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kegiatan						3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	12	80.000.000		
			Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan manusia	Tingkat pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	%						100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	400	340.000.000		
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Tahun						1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4	120.000.000		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit						43	50.000.000	43	50.000.000	43	50.000.000	43	50.000.000	172	200.000.000		
			Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Terlaksananya pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Orang						42	5.000.000	42	5.000.000	42	5.000.000	42	5.000.000	168	20.000.000		
				JUMLAH TOTAL								14.092.810.506	15.778.120.523	16.178.120.523	16.578.120.539	16.978.120.547	17.228.120.555	96.833.413.193				

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Serang. Guna menyesuaikan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka penetapan Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang sesuai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Program Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan bencana serta penanganan pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%
2	Tingkat pelayanan pencegahan penanggulangan. penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dimana hasil pelaksanaan Renstra 2021-2026 tersebut nantinya akan menjadi tolok ukur keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang terkait dengan capaian target kinerja, pelaksanaan anggaran dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra ini pada dasarnya adalah untuk menjamin kesinambungan perencanaan program dan kegiatan serta anggaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD) maupun jangka menengah (RPJMD) yang pada intinya adalah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Serang melalui strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan sinergi dengan para *stakeholders* pembangunan lainnya.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang disusun dengan harapan menjadi dokumen rujukan perencanaan Perangkat Daerah yang aplikatif sehingga pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Serang dapat tepat sasaran dan tepat guna.

Serang, November 2021

**KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN SERANG**


NANA SUKMANA KUSUMA, SE, MM
NIP. 196404241985031015

LAMPPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JLN. KITAPA NOMOR 1 TELEPON (0254) 200113, 200135
SERANG

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SERANG
Nomor : 050/SK.030/BPBD/2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2021-2026

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang mendukung pembangunan berjalan secara efektif, efisien dan berkesinambungan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 maka perlu disahkan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Serang;
21. Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang;
22. Peraturan Bupati Serang Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang

MEMUTUSKAN:

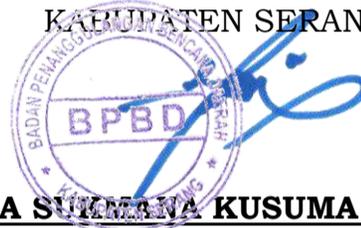
Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;

- KEDUA : Pengesahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Menjadi pedoman Unit Kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang dalam menyusun Rancangan Dokumen Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 28 November 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SERANG



NANA SUTAMA KUSUMA, SE, MM
NIP. 196404241985031015

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang.
2. Yth. Wakil Bupati Serang.
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang.
5. Yth. Inspektur Kabupaten Serang.
6. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Serang.

**TABEL KELENGKAPAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SERANG**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian/ Kelengkapan *)		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Penyiapan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi	√			
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota	√			
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
7	Perumusan isu-isu strategis	√			
8	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
9	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu perPerangkat Daerah kabupaten/kota	√			
10	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
11	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
12	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√			
13	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian/ Kelengkapan *)		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
14	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√			
15	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
16	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√			
17	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	√			

Serang, November 2021

KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN SERANG



NANA SUKMANA KUSUMA, SE, MM

NIP. 196404241985031015



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
INSPEKTORAT**

Jl. Diponegoro Nomor 1 Telp. (0254) 200816 Serang

**CATATAN HASI REVIU (CHR)
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SERANG
TAHUN 2021 – 2026**

Nomor :



**INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG INSPEKTORAT

Jln. Diponegoro Nomor 1 Telp. 200816

CATATAN HASIL REVIU (CHR) ATAS RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPBD KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 – 2026

Disusun oleh Tanggal	Drs. Raden Lukman. M.Si (Ketua Tim) 29 Oktober 2021
Direview oleh Tanggal	H. Mohamad Sukirman. SE. MM (Supervisor) 29 Oktober 2021
Disetujui oleh Tanggal	H. Haryadi. S.Sos. M.Si (Wakil Penanggungjawab) 29 Oktober 2021

I. URAIAN CATATAN HASIL REVIU

Berdasarkan Surat Perintah Inspektur Kabupaten Serang Nomor : 700/540/Inspektorat/2021 tanggal 8 Oktober 2021 untuk melakukan Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut:

DATA UMUM :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang melaksanakan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang dan Peraturan Bupati Serang Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang.

Adapun Fungsi Dinas BPBD sbb :

1. Perencanaan program kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan kedaruratan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta pemadam kebakaran;
2. Pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan kedaruratan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta pemadam kebakaran;
3. Pelaksanaan administrasi dan teknis operasional pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan kedaruratan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta pemadam kebakaran; dan
4. Pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan kedaruratan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta pemadam kebakaran.

Tujuan Dinas

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.

4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sasaran Dinas

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Indikator Kinerja

1. Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan bencana serta penanganan pasca bencana
2. Tingkat pelayanan pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran

Jumlah Program dan Kegiatan

1. Jumlah program : 2 program
2. Jumlah kegiatan : 15 kegiatan

II. URAIAN HASIL REVIU

A. Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Reviu Rancangan Akhir RENSTRA- BPBD.

Berdasarkan Reviu terhadap dokumen pendukung Rancangan Akhir Renstra BPBD belum sepenuhnya didukung dokumen yang memadai, sebagai berikut :

1. Dokumen RPJMD belum diperdakan dan sedang dalam proses fasilitasi dan evaluasi Pemerintah Provinsi Banten
2. Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra BPBD periode sebelumnya belum ada
3. Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan Renstra BPBD belum ada
4. Hasil verifikasi atas rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dari BPBD, belum ada
5. SK Tim Penyusun Renstra sedang dalam proses penetapan melalui Keputusan Bupati Serang.

B. Konsistensi dan Keterhubungan antara Dokumen Renstra BPBD dengan Dokumen RPJMD

Tujuan: Untuk menguji rumusan indikator dan pagu program serta kegiatan dalam Renstra-Perangkat Daerah telah konsisten dan relevan dengan RPJMD

Berdasarkan hasil reviu diketahui indikator kinerja program sudah sesuai antara renstra dana RPJMD, namun pagu anggaran masih belum sesuai dengan RPJMD. sebagai berikut :

BAB VI RENSTRA-PD				BAB VII RPJMD				Hasil Pengujian	
Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Pagu	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Pagu	Sesuai	Tidak Sesuai
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan bencana serta penanganan pasca bencana	100%	40.767.380.042	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan bencana serta penanganan pasca bencana	100%	16.432.880.000		√
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	100%	58.808.820.000	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kobakaran	100%	15.831.810.000		√

C. Penilaian Keterhubungan Kegiatan Renstra-Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Program Pembangunan Daerah RPJMD.

Tujuan: Untuk menguji rumusan indikator dan pagu program serta kegiatan dalam Renstra-Perangkat Daerah telah konsisten dan relevan dengan RPJMD (Penilaian Keterhubungan Kegiatan Renstra-Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Program Pembangunan Daerah RPJMD)

Berdasarkan hasil revidi diketahui bahwa rumusan indikator dan pagu program serta kegiatan dalam Renstra-Perangkat Daerah telah konsisten dan relevan dengan RPJMD dan mendukung terhadap pencapaian program pembangunan daerah RPJMD. Sebagai berikut :

BAB VI RENSTRA-PD				BAB VI RPJMD	Hasil Pengujian	
Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Satuan	Program Pembangunan Daerah	Mendukung	Tidak Mendukung
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan bencana serta penanganan pasca bencana	100	%	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	√	
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%		√	
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan dokumen kajian risiko bencana	5	Dokumen		√	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	5	Kegiatan		√	
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%		√	
	Persentase penanganan pasca bencana	100	%		√	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Serang	5	Dokumen		√	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	250	Orang		√	
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Dalops dan Penyediaan sarpras kesiapsiagaan terhadap bencana	2	Unit		√	
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	5	Unit		√	
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Pembentukan tim jituPasna	6 Tim Lintas (Tingkat Kab. Kec. Desa)	Orang		√	
	Bimtek Pelatihan Tim JituPasna	10	Kegiatan		√	
	Rakor Penanganan Pasca Bencana	11	Kegiatan		√	
	Pembangunan Kembali Lokasi Pasca Bencana	37 Lokasi 320 Rumah	Paket		√	

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas anggota TRC bencana kabupaten/kota	60	kegiatan		√	
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) bencana	15	kegiatan		√	
Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah pelaksanaan kegiatan apel/gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	5	kegiatan		√	
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%		√	
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan tanggap darurat bencana di wilayah Kabupaten Serang	72	Bulan		√	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah logistik korban bencana yang tersedia dan pembayaran honor bulanan dan honor piket petugas logistik	500	Tahun		√	
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah aktivasi sistem komando penanganan darurat	10	Kegiatan		√	
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tingkat ketersediaan sistem dasar penanggulangan bencana	100	%		√	
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi (Perda/Perbup) tentang Penanggulangan Bencana	5	Dokumen		√	
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang terbentuk	50	Desa		√	
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan Program Flood Management On Selected River Basin (FMSRB) di Kabupaten Serang	12	Kegiatan		√	
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Website dan aplikasi Penanggulangan Bencana Kab. Serang Sebagai media Informasi, Sosialisasi dan Edukasi Penanggulangan Bencana	5	Website/aplikasi		√	
	Pembayaran jasa piket humas	60	Bulan		√	
	pembayaran tunjangan leader humas	60	Bulan		√	
	Pembayaran Honor anggota humas	36	Bulan		√	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya Monev Penilaian DESTANA yang telah terbentuk dan Temu DESTANA	10	Kegiatan		√	
	Belanja makan dan minum pelaksanaan pembinaan dan pengawasan	60	Bulan		√	
	Terlaksananya pembayaran upah jasa pengawas dan pembinaan (koordinator) penanggulangan bencana	60	bulan		√	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	100	%		√	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON-KEBAKARAN
Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	%		√	
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembayaran Honor dan jasa piket Anggota Damkar Non PNS, honor.	72	bulan		√	

	pengamanan, makin kesempurnaan dan operasional kebakaran					
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Terlaksananya Pembayaran Honor dan jasa piket Anggota Non PNS	72	bulan		√	
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	13500	Liter		√	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	150	Paket		√	
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	290	orang		√	
Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	60	Dokumen		√	
Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Tingkat inspeksi peralatan proteksi kebakaran	100	%		√	
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	3675	Perusahaan		√	
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	500	%		√	
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tingkat pemberdayaan kesiapsiagaan masyarakat dalam pencegahan kejadian kebakaran	100	%		√	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	15	Kegiatan		√	
Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan manusia	Tingkat pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100	%		√	
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	320	Kegiatan		√	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	215	Unit		√	
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	210	Orang		√	

D. Keterhubungan Dan Kesesuaian Program Dan Kegiatan Dengan Tujuan, Dan Sasaran Perangkat Daerah Dalam Dokumen Renstra- Perangkat Daerah

Tujuan: Untuk menguji rumusan program dalam rancangan akhir Renstra- Perangkat Daerah mendukung pencapaian sasaran Renstra-Perangkat Daerah

Berdasarkan revidi diketahui bahwa rumusan program dalam rancangan akhir renstra mendukung pencapaian sasaran Renstra. Namun, Terdapat indikator yang dibahas pada gambaran umum bab II, seharusnya dilengkapi data pendukung indikator lainnya sebagai referensi peningkatan target.

BAB VI RENSTRA-PD				Kriteria Indikator Program/Kegiatan						BAB II RENSTRA-PD	Hasil Pengujian	
Program / Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	(specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C))						Cermati Bab II, temukan pembahasan data pendukung setiap indikator yang sebelumnya diamati pada Bab VI	Mendukung	Tidak Mendukung
				S	M	A	R	T	C			
				Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak			
				Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak	Ya/ Tidak		Ya, hal ...	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan bencana serta penanganan pasca bencana	100	%	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-20 di tabel 2.7 Target dan Realisasi Capaian Pelayanan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018-2020	Ya	
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-20 di tabel 2.7 Target dan Realisasi Capaian Pelayanan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018-2020	Ya	
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan dokumen kajian risiko bencana	5	Dokumen	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	tidak ada data pendukung, pencapaian indikator	Ya	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	5	Kegiatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-20 di tabel 2.7 Target dan Realisasi Capaian Pelayanan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018-2020	Ya	
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-20 di tabel 2.7 Target dan Realisasi Capaian Pelayanan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018-2020	Ya	

	Persentase penanganan pasca bencana	100	%	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-20 di tabel 2.7 Target dan Realisasi Capaian Pelayanan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018-2020	Ya
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tertaksananya penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Serang	5	Dokumen	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	tidak ada data pendukung, pencapaian indikator	Ya
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Tertaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	250	Orang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-25 yang berisi kajian KLHS tentang macam Bencana yang terjadi dalam 5 tahun ke depan	Ya
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tertaksananya Dalops dan Penyediaan sarpras kesiapsiagaan terhadap Bencana	2	Unit	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-9 yang berisi tenaga operator Pusdalops/Rescue dan II-11 Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran Tahun 2012-2021	Ya
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	5	Unit	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-11 Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran Tahun 2012-2021	Ya
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Pembentukan tim jituPasne	8 Tim Lintas (Tingkat Kab. Kec. Desa)	Orang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	tidak ada data pendukung, pencapaian indikator	Ya
	Bimtek Pelatihan Tim JituPasne	10	Kegiatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	tidak ada data pendukung, pencapaian indikator	Ya
	Rekor Penanganan Pasca Bencana	11	Kegiatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-20 di tabel 2.7 Target dan Realisasi Capaian Pelayanan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018-2020	Ya
	Pembangunan Kembali Lokasi Pasca Bencana	37 Lokasi	Paket	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-21 di tabel 2.8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017-2020	Ya

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas anggota TRC bencana kabupaten/kota	60	kegiatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-10 Tabel 2.2 tentang Komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021	Ya
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) bencana	15	kegiatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	tidak ada data pendukung, pencapaian indikator	Ya
Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah pelaksanaan kegiatan apel/gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	5	kegiatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	tidak ada data pendukung, pencapaian indikator	Ya
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-20 di tabel 2.7 Target dan Realisasi Capaian Pelayanan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016-2020	Ya
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan tanggap darurat bencana di wilayah Kabupaten Serang	72	Bulan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-21 di tabel 2.8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017-2020	Ya
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah logistik korban bencana yang tersedia dan pembayaran honor bulenen dan honor piket petugas logistik	5	Tahun	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	tidak ada data pendukung, pencapaian indikator	Ya
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah aktivasi sistem komando penanganan darurat	10	Kegiatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	tidak ada data pendukung, pencapaian indikator	Ya
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tingkat ketersediaan sistem dasar penanggulangan an bencana	100	%	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-20 di tabel 2.7 Target dan Realisasi Capaian Pelayanan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018-2020	Ya
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi (Perda/Perbup) tentang Penanggulangan an Bencana	5	Dokumen	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	tidak ada data pendukung, pencapaian indikator	Ya
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Tengguh Bencana (DESTANA) yang terbentuk	50	Desa	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-21 di tabel 2.8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)	Ya

										Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017-2020		
Kerjasama antar Lembaga dan Kamitran dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan Program Flood Management On Selected River Basin (FMSRB) di Kabupaten Serang	12	Kegiatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	tidak ada data pendukung, pencapaian indikator	Ya	
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Website dan aplikasi Penanggulangan Bencana Kab. Serang Sebagai media Informasi, Sosialisasi dan Edukasi Penanggulangan Bencana	5	Website/aplikasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	tidak ada data pendukung, pencapaian indikator	Ya	
	Pembayaran jasa piket humas	60	Bulan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	tidak ada data pendukung, pencapaian indikator	Ya	
	pembayaran tunjangan leader humas	60	Bulan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	tidak ada data pendukung, pencapaian indikator	Ya	
	Pembayaran Honor anggota humas	30	Bulan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	tidak ada data pendukung, pencapaian indikator	Ya	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya Monev Penilaian DESTANA yang telah terbentuk dan Temu DESTANA	10	Kegiatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-21 di tabel 2.8 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017-2020	Ya	
	Belanja makan dan minum pelaksanaan pembinaan dan pengawasan	60	Bulan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	tidak ada data pendukung, pencapaian indikator	Ya	
	Tertaksananya pembayaran upah jasa pengawas dan pembinaan (koordinator) penanggulangan bencana	60	bulan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	tidak ada data pendukung, pencapaian indikator	Ya	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	100	%	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-20 di tabel 2.7 Target dan Realisasi Capaian Pelayanan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018-2020	Ya	
Kegiatan Pencegahan,	Tingkat pelayanan	100	%	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-20 di tabel	Ya	

Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									2.7 Target dan Realisasi Capaian Pelayanan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018-2020	
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembayaran Honor dan jasa piket. Anggota Damkar Non PNS, honor pengamanan, makin kesempatahan dan operasional kebakaran	72	bulan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	tidak ada data pendukung, pencapaian indikator	Ya
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Terlaksananya Pembayaran Honor dan jasa piket Anggota Non PNS	72	bulan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	tidak ada data pendukung, pencapaian indikator	Ya
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	13500	Liter	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-20 di tabel 2.7 Target dan Realisasi Capaian Pelayanan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018-2020	Ya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	150	Paket	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-11 Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran Tahun 2012-2021	Ya
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	290	orang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	tidak ada data pendukung, pencapaian indikator	Ya
Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	60	Dokumen	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	tidak ada data pendukung, pencapaian indikator	Ya
Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Tingkat inspeksi peralatan proteksi kebakaran	100	%	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-11 Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran Tahun 2012-2021	Ya

Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	3675	Perusahaan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-11 Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran Tahun 2012-2021	Ya
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	500	%	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-11 Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran Tahun 2012-2021	Ya
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tingkat pemberdayaan kesiapsiagaan masyarakat dalam pencegahan kejadian kebakaran	100	%	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-20 di tabel 2.7 Target dan Realisasi Capaian Pelayanan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018-2020	Ya
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	15	Kegiatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-20 di tabel 2.7 Target dan Realisasi Capaian Pelayanan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018-2020	Ya
Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan manusia	Tingkat pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100	%	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	tidak ada data pendukung, pencapaian indikator	Ya
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keolomatan Manusia	Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	320	Kegiatan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	tidak ada data pendukung, pencapaian indikator	Ya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	215	Unit	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ada, terdapat pada halaman II-11 Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran Tahun 2012-2021	Ya
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan	210	Orang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	tidak ada data pendukung, pencapaian indikator	Ya

Supervisor/Pengendali Teknis



H. Mohamad Sukirman, SE, MM
Nip. 19720426 199703 1 004

Ketua Tim Reviu



Drs. Raden Lukman, M.Si
NIP. 197008141997111001

Anggota Tim



Supriyanto, S.Sos, MM
NIP. 197302021993031004

Anggota Tim

Drs. H. Ahmad Syatiri
Nip 19641228 198608 1 001

Anggota Tim



Drs. UU Faturachman
Nip. 19650205 198403 1 001

Anggota Tim



Muhamad Muchtar, S. Ag, M.Si
Nip. 19661010 200312 1 001

Anggota



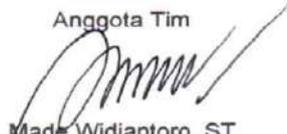
Imroni, M.KM
Nip. 197304261994031007

Anggota Tim



Iwan Herawan, ST
Nip. 19740730200502-1.001

Anggota Tim


Made Widiatoro, ST
Nip. 19751118 201001 1 004

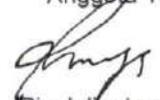
Anggota Tim


Dwitika, ST
Nip. 19890823201903200

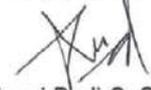
Anggota Tim


Listia Lailita, ST
Nip. 198905172019032001

Anggota Tim


Rio Juliantony, ST
NIP. 199407142019031001

Anggota Tim


Venni Budi C, ST
NIP. 199102222019032003